

STATISTIK PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR

2
0
2
0



STATISTIK PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR



2
0
2
0

STATISTIK PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR, 2020

ISSN : 2503-2125
Katalog : 3302001.35
No. Publikasi : 35000.2125

Ukuran Buku : B5 JIS
Jumlah Halaman : xii + 168 halaman

Naskah : BPS Provinsi Jawa Timur

Penyunting : BPS Provinsi Jawa Timur

Desain Sampul : BPS Provinsi Jawa Timur

Diterbitkan Oleh :
© BPS Provinsi Jawa Timur

Dicetak Oleh :
PT. Sinar Murni Indoprinting

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Statistik Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Timur 2020

Pengarah
Dr. Dadang Hardiwan, S.Si., M.Si.

Penanggung jawab Umum :
Drs. Sunaryo, M.Si.

Penanggung jawab Teknis :
Drs. Sunaryo, M.Si.
Dian Parwitasari, SE., M.Si.

Editor :
Drs. Sunaryo, M.Si.
Dian Parwitasari, SE., M.Si.

Penulis dan Pengolah Data :
Daizy Pangeswari

Desain/Layout :
Daizy Pangeswari

Desain Sampul :
Arga Parama Yufinanda, S.ST.

KATA PENGANTAR

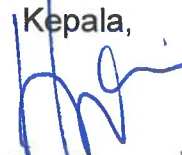
Dalam rangkaian proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pemantauan progres yang berkesinambungan dan melihat hasil evaluasi pembangunan sesuai atau tidak dengan yang direncanakan, harus selalu didasari dari data. Salah satunya adalah data sosial ekonomi yang sangat diperlukan untuk mendukung rangkaian proses pembangunan tersebut. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang bertujuan untuk mengumpulkan data sosial ekonomi penduduk Jawa Timur dengan pendekatan rumah tangga, layak digunakan sebagai salah satu rujukan data pendukung dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Salah satu sektor dalam perencanaan pembangunan yaitu sektor perumahan, menggunakan data Susenas untuk menghasilkan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi perumahan di Jawa Timur.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi penting secara cepat dan mudah bagi para pengguna data, serta pengambil kebijakan di bidang perumahan dan pemukiman. Dengan demikian sasaran dan target pembangunan perumahan dan pemukiman dapat direncanakan.

Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam terwujudnya laporan eksekutif ini diucapkan terima kasih. Saran serta kritik yang membangun akan sangat kami harapkan demi perbaikan penulisan berikutnya. Demikian, semoga laporan eksekutif ini dapat bermanfaat.

Surabaya, Agustus 2021

Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Timur
Kepala,



Dr. Dadang Hardiwan, S.Si., M.Si.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar-----	v
Daftar Isi -----	vii
Daftar Gambar-----	ix
Daftar Tabel-----	xi
Bab I. Pendahuluan -----	1
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Maksud dan Tujuan -----	2
1.3 Sistematika Penulisan -----	2
Bab II Metodologi -----	5
2.1 Sumber Data-----	5
2.2 Konsep dan Definisi-----	5
Bab III Ulasan-----	11
3.1 Penguasaan Tempat Tinggal -----	11
3.1.1 Jumlah Keluarga yang Tinggal Dalam Bangunan Sensus-----	11
3.1.2 Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal -----	12
3.2 Kondisi Fisik Bangunan -----	15
3.2.1 Penggunaan Atap Terluas-----	15
3.2.2 Penggunaan Dinding Terluas -----	15
3.2.3 Penggunaan Lantai Terluas -----	16
3.3 Fasilitas yang Dimiliki Rumah Tangga -----	21
3.3.1 Sumber Air Untuk Minum -----	21
3.3.2 Sumber Air Untuk Mandi/Cuci/DII -----	21
3.3.3 Jarak Sumber Air Minum dan Sumber Air Mandi/Cuci/DII ke Tempat Penampungan Akhir Kotoran -----	22
3.3.4 Bahan Bakar Utama Untuk Memasak -----	23
3.3.5 Sumber Penerangan -----	24
3.3.6 Fasilitas BAB (Buang Air Besar) -----	25
3.3.7 Jenis Kloset yang Digunakan -----	25
3.3.8 Tempat Pembuangan Akhir Tinja -----	26
3.4 Kesehatan Lingkungan-----	37
3.4.1 Sanitasi Layak -----	37
3.4.2 Air Minum Layak -----	38
3.4.3 Rumah Layak Huni -----	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Persentase Keluarga yang Tinggal di Dalam Bangunan Sensus /Rumah Menurut Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Keluarga , 2020 -----	11
Gambar 2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2019-2020 -----	12
Gambar 3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Atap Terluas di Jawa Timur, 2020 -----	15
Gambar 4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020 -----	16
Gambar 5.	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Lantai Terluas di Jawa Timur, 2019-2020 -----	17
Gambar 6.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Perkapita, 2019-2020 -----	17
Gambar 7.	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak, 2019-2020 -----	24
Gambar 8.	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Sumber Penerangan 2019-2020 -----	24
Gambar 9.	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat BAB dan Penggunaannya, 2020-----	25
Gambar 10.	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Berdasarkan Penggunaan Jenis Kloset, 2019-2020 -----	26
Gambar 11.	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Akses Terhadap Air Minum Layak, 2016 – 2020 -----	38
Gambar 11.	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Akses Terhadap Air Minum Layak, 2016 – 2020-----	38



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020 ----- 14
- Tabel 2. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Rumah/Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020 ----- 18
- Tabel 3. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020 ----- 19
- Tabel 4. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020 ----- 20
- Tabel 5. Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Berdasarkan Penggunaan Sumber Air Untuk Minum, 2019-2020 ----- 21
- Tabel 6. Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Berdasarkan Penggunaan Sumber Air Untuk Mandi/Cuci/Dll, 2019-2020 ----- 22
- Tabel 7. Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Berdasarkan Jarak Sumber Air Utama Untuk Memasak dan Minum ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2020----- 23
- Tabel 8. Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja, 2019-2020----- 27
- Tabel 9. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020 ----- 28
- Tabel 10. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Memasak Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020 ----- 29
- Tabel 11. Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019 – 2020----- 30
- Tabel 12. Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Utama Untuk Mandi/Cuci/dll ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019 – 2020 ----- 31
- Tabel 13. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar Utama yang Digunakan Untuk Memasak Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020 ----- 32



- Tabel 14. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Sumber Penerangan Utama Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019 – 2020 ----- 33
- Tabel 15. Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat BAB Rumah/ Bangunan Tempat Tinggal Terluas per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020----- 34
- Tabel 16. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan oleh Rumah Tangga dengan Akses Tempat Buang Air Besar untuk ART Sendiri atau Bersama per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020 ----- 35
- Tabel 17. Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja oleh Rumah Tangga dengan Akses Tempat Buang Air Besar untuk ART Sendiri atau Bersama per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020----- 36
- Tabel 18. Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2020 ----- 40
- Tabel 19. Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2020 41
- Tabel 20. Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Rumah Layak Huni Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020--- 42

<https://jatim.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah sebagai kebutuhan dasar sangat diperlukan oleh masyarakat, sebagai tempat tinggal, tempat memperoleh Pendidikan informal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Selain itu di dalam undang-undang tersebut menyebutkan juga bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Se jauh ini pemerintah telah memfasilitasi penyelenggaraan perumahan dan pemukiman melalui berbagai program.

Sebagai tempat tinggal, idealnya rumah yang layak ditinggali atau dihuni memiliki fasilitas kamar tidur, kamar mandi, dapur, kakus (WC) tersendiri, adanya penerangan listrik serta sumber air bersih untuk minum, memasak dan mandi/cuci/dll. Apabila dilihat dari sudut lingkungan perumahan, tentunya setiap orang mengidamkan rumah yang berlokasi di pinggir jalan, bebas banjir, dekat fasilitas umum, mempunyai pekarangan, bersih dan aman dari berbagai gangguan atau polusi lingkungan seperti bau got, asap dan limbah pabrik, serta tidak bising oleh suara kendaraan bermotor ataupun gangguan lainnya yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban. Namun demikian, terkadang hal ini cukup sulit didapat karena minimnya luas lahan untuk pemukiman dan juga antara ketersediaan, tidak sebanding dengan jumlah permintaan. Jika dikaitkan dengan sudut pandang lingkungan perumahan, kondisi perumahan beserta fasilitasnya, pada umumnya mencerminkan status sosial ekonomi pemiliknya. Masyarakat yang memiliki ekonomi menengah keatas bisa berada atau tinggal dalam lingkungan perumahan yang layak huni. Tetapi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah hanya bisa tinggal dalam lingkungan rumah yang seadanya bahkan bisa dikatakan mereka



berada pada lingkungan kumuh.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi titik perhatian bagi pemerintah di pusat maupun di daerah. Peran serta BPS dalam membantu pemerintah adalah melalui penyediaan data yang terkait dengan perumahan dan pemukiman. Untuk itulah publikasi ini dibuat sebagai salah satu sarana penyediaan data bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan perumahan dan pemukiman. Di dalam publikasi ini mengupas keterangan mengenai perumahan. Keterangan perumahan bisa menggambarkan keadaan kesejahteraan dari rumah tangga, seperti atap rumah, dinding, lantai, sanitasi, sumber air minum utama, sumber air memasak/mandi/cuci, tempat mencuci tangan, penerangan dan bahan bakar memasak. Keterangan perumahan diperoleh dari rumah tangga, segala informasi yang berkaitan menjelaskan tentang kondisi perumahan yang ditempati pada saat pencacahan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Publikasi ini menyajikan berbagai indikator perumahan yang meliputi kondisi fisik bangunan, fasilitas perumahan, dan lain-lain yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan di bidang perumahan dan pemukiman. Disamping berguna bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan dan perencanaan program ke depan, diharapkan publikasi ini juga dapat bermanfaat bagi pihak swasta dan para konsumen pengguna data lainnya.

1.3. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam publikasi ini disusun menjadi tiga bab. Bab pertama adalah Pendahuluan, yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bab kedua adalah Metodologi, berisi sumber data serta konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini. Bab ketiga adalah ulasan, yang berisi ulasan singkat mengenai kondisi perumahan.

Bagian terakhir dalam publikasi ini disajikan informasi (data) mengenai kondisi perumahan dan pemukiman rumah tangga di Jawa Timur tahun 2020 dan beberapa diantaranya disajikan data tahun sebelumnya sebagai pembanding. Data disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang berisi informasi tentang kondisi perumahan menurut penguasaan tempat tinggal yang meliputi status penguasaan rumah, status tanah



tempat tinggal dan luas lantai, kondisi fisik bangunan yang meliputi jenis bangunan sensus yang ditempati, atap, dinding dan lantai terluas. Informasi untuk fasilitas tempat tinggal meliputi kualitas air minum, sumber air minum rumah tangga, sumber air untuk MCK, jarak penampungan kotoran (tinja) terhadap sumber air minum rumah tangga, fasilitas tempat buang air besar, bahan bakar dan sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga. Selain itu disajikan pula data mengenai RTLH dan air layak minum yang selalu menjadi acuan dalam pemenuhan data tentang perumahan dan pemukiman.

<https://jatim.bps.go.id>



BAB II

METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2020. Data dan informasi perumahan dari sampel rumah tangga dikumpulkan menggunakan daftar VSEN20.K. Sampel data Susenas di desain hanya sampai level kabupaten/kota sehingga hasilnya merupakan kondisi secara makro pada level tersebut dan tidak bisa menggambarkan hingga level dibawahnya (kecamatan, desa/kelurahan atau rw/rt).

2.2. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang digunakan dalam laporan eksekutif ini adalah istilah yang banyak digunakan. Pencantuman konsep dan definisi bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari tulisan ini. Konsep dan definisi yang digunakan antara lain:

Rumah tangga, rumah tangga yang digunakan dalam penulisan ini adalah rumah tangga biasa yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak, selain itu yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga biasa antara lain :

- Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri.
- Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut dalam blok sensus yang sama.
- Pondokan dengan makan (indekost) yang pemonoknya kurang dari 10 orang. Pemonok dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.
- Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.



Penggunaan Bangunan :

- **Tempat Tinggal Biasa** adalah bangunan tempat tinggal yang seluruhnya hanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari rumah tangga saja.
- **Tempat Tinggal Campuran** adalah bangunan tempat tinggal yang sebagian dari bangunan tempat tinggal tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari rumah tangga dan sebagian lagi untuk keperluan usaha ataupun untuk keperluan lainnya.

Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal :

- **Rumah Milik Sendiri** adalah rumah yang pada saat pencacahan dimiliki oleh salah satu anggota rumah tangga (termasuk yang masih dalam masa kredit).
- **Rumah Kontrak** adalah rumah yang disewa oleh rumah tangga dalam jangka tertentu menurut perjanjian antara pemilik dan pemakai dengan batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- **Rumah Sewa** adalah rumah yang disewa oleh rumah tangga dengan pembayaran sewa secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.
- **Rumah Bebas Sewa** adalah rumah yang diperoleh dari pihak lain dan ditempati (didiami) oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
- **Rumah Dinas** adalah rumah yang dimiliki oleh suatu instansi tempat bekerja dari salah satu anggota rumah tangga, baik dengan membayar sewa maupun tidak.
- **Rumah milik orang tua/famili** adalah rumah bukan milik sendiri, melainkan milik orang tua/famili dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.

Status Tanah Tempat Tinggal/Status Hukum Tanah adalah hak untuk mempergunakan tanah tidak termasuk benda-benda lain di dalam tanah seperti bahan-bahan mineral dan minyak, dalam bentuk jenis sertifikat tanah yang dikeluarkan pemerintah atau turun temurun berdasarkan adat yang diakui pemerintah. Status hukum tanah yang dimaksud adalah status hukum dari tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal responden, tanpa memperhatikan status kepemilikan dari tempat tinggal tersebut. Status tanah tempat tinggal/Status Hukum Tanah meliputi Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.



Kualitas Bangunan :

Lantai, adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari tanah maupun bukan tanah, seperti: keramik, marmer, papan, dan semen.

Luas Lantai, adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Sedangkan bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai.

Luas Lantai perkapita, adalah rasio luas rumah/bangunan tempat tinggal dibagi jumlah penghuni per meter persegi.

Atap, adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga anggota rumah tangga yang mendiaminya terlindung terutama dari terik matahari serta hujan.

Beton, adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air.

Genteng, adalah atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, termasuk genteng keramik, metal/logam, tanah liat atau fiber.

Asbes, adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen, umumnya atas asbes berbentuk gelombang.

Lainnya, meliputi kayu/sirap, seng, bamboo, jerami, ijuk.

Dinding, adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan lain.

Tembok, adalah dinding yang terbuat dari susunan batu merah atau batako, biasanya dilapisi plesteran semen.

Plesteran anyaman bamboo/kawat, adalah dinding yang terbuat dari anyaman bamboo atau kawat dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, diplester dengan campuran semen dan pasir.

Kayu, adalah dinding yang terbuat dari bagian pohon yang tua.

Batang Kayu, adalah dinding yang terbuat dari batang pohon yang masih utuh/bulat.

Anyaman Bambu, adalah bamboo yang diiris tipis-tipis, dirajut seperti kain dan berbentuk lebar.

Lainnya, meliputi seng, kardus dan lain-lain.

Jamban/kloset, adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kaskus.

Kloset Leher Angsa, adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.



Plengsengan, adalah jamban/kaskus yang dibawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.

IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)/SPAL, yaitu sebuah struktur yang dirancang secara terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota untuk membuang dan memisahkan limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan untuk keperluan lain.

Got/selokan adalah saluran untuk menyalurkan air pembuangan tinja/limbah/air hujan ke suatu tempat untuk menghindari masalah lingkungan dan kesehatan.

Lubang tanah adalah liang atau lekukan di dalam tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).

Sanitasi Layak : Rumah tangga dikatakan memiliki sanitasi layak apabila rumah tangga menggunakan fasilitas buang air besar (BAB) sendiri, bersama atau komunal. Menggunakan jenis kloset yang berbentuk leher angsa serta tempat pembuangan akhir tinja melalui tangki atau SPAL. Konsep sanitasi layak mengacu pada konsep terbaru berdasarkan Surat Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019.

Sumber air minum

Air dalam kemasan adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan (gallon, botol atau gelas).

Air leding adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air.

Air sumur terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali serta dilindungi oleh tembok dan lantai semen.

Mata air terlindung adalah sumber air dari permukaan tanah yang timbul dengan sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci atau lainnya.

Air sumur/mata air tak terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali atau air yang muncul dari permukaan tanah, tanpa ada perlindungan terhadap limbah.

Sumber Air Minum Layak : Rumah tangga dikatakan menggunakan atau mempunyai akses air minum layak apabila sumber air minum yang digunakan rumah tangga berasal dari leding dan air terlindung (pompa/sumur bor, sumur terlindung, mata air terlindung). Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka



rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Konsep ini mengacu pada konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019.

Listrik

Listrik PLN dengan meteran yaitu sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN dengan menggunakan meteran (volumetric).

Listrik tanpa meteran yaitu sumber penerangan listrik yang bersumber langsung dari tiang listrik, tidak melalui meteran atau listrik yang disalurkan dari listrik tetangga.

Listrik PLN non PLN yaitu sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu/aki, generator dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

Sumber penerangan bukan listrik yaitu sumber penerangan listrik seperti petromak, aladin, pelita sentir, obor, lilin, karbit, biji jarak, kemiri dan lain-lain.

Kuintil yaitu pengelompokan seluruh individu di suatu wilayah berdasarkan lima kelompok (dua puluh persen) yang sama jumlahnya, namun terlebih dahulu diurutkan dari yang terendah kondisi ekonominya sampai yang tertinggi kondisi ekonominya. Sehingga berturut-turut akan diperoleh kuintil pertama adalah kelompok penduduk dua puluh persen pertama (terendah secara ekonomi), kuintil kedua adalah penduduk pada persentase ke dua puluh satu sampai dengan empat puluh persen dari populasi yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik, dan seterusnya sampai kuintil kelima adalah penduduk pada persentase 81 persen sampai persen ke seratus dari populasi yang memiliki tingkat ekonomi di atas kuintil pertama sampai ke empat.



3.1 Penguasaan Tempat Tinggal

3.1.1. Jumlah Keluarga yang Tinggal Dalam Bangunan Sensus

Keluarga adalah hubungan yang didasarkan atas ikatan perkawinan, baik yang saat ini statusnya masih kawin atau sudah bercerai. Keluarga bias terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, ayah saja atau ibu saja. Dalam satu bangunan sensus atau dalam satu rumah biasanya dihuni oleh satu keluarga tetapi karena keterbatasan ekonomi atau hal-hal lain maka di dalam satu rumah tangga bisa dihuni lebih dari satu keluarga. Susenas Maret 2020 mencatat rata-rata jumlah keluarga yang tinggal dalam satu rumah sebanyak satu keluarga. Bangunan sensus/rumah yang ditinggali sebanyak 1 hingga 3 keluarga mencapai 99,19 persen, dan yang ditinggali lebih dari 4 keluarga sebesar 0,81 persen.

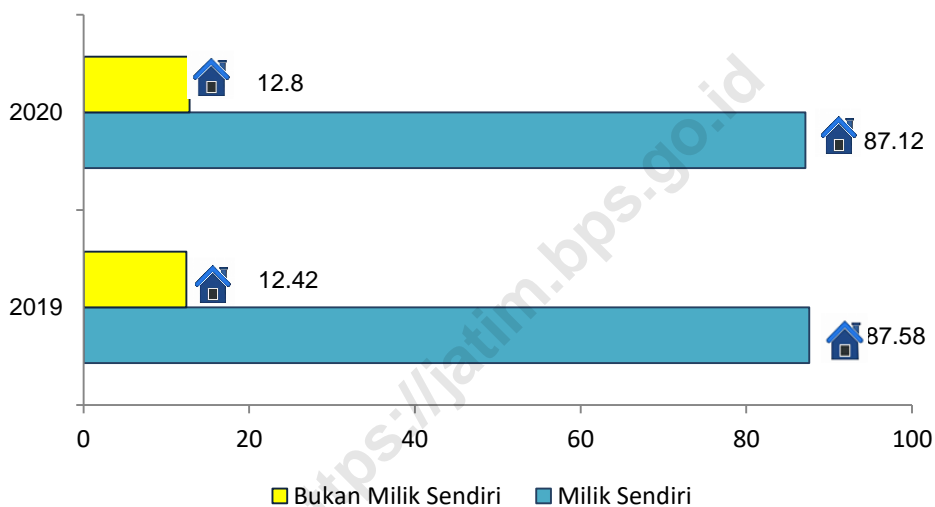
Gambar 1. Persentase Keluarga yang Tinggal di Dalam Bangunan Sensus/Rumah Menurut Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Keluarga , 2020



3.1.2. Status Penguasaan Tempat Tinggal

Salah satu kebutuhan dasar rumah tangga adalah adanya papan (rumah). Kenyamanan dalam menempati sebuah rumah tidak hanya dilihat dari bangunan dan lingkungan sekitar rumah tetapi juga status penguasaan rumah tersebut. Status penguasaan rumah akan memberikan ketenangan terhadap penghuninya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri akan lebih tenang dibandingkan mereka yang menempati rumah sewa.

Gambar 2. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2019-2020



Pada gambar 2 status penguasaan bangunan tempat tinggal dibagi menjadi dua yaitu bangunan tempat tinggal milik sendiri dan bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri. Bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri terbagi atas, kontrak/sewa, bebas sewa/dinas dan lainnya seperti rumah tangga yang tinggal di rumah adat. Status penguasaan milik sendiri diartikan bahwa tempat tinggal tersebut benar-benar dimiliki rumah tangga atau salah satu dari anggota rumah tangga. Demikian juga apabila rumah tangga tersebut dalam penguasaan tempat tinggal menempati rumah yang dibeli secara angsuran dianggap menguasai tempat tinggal milik sendiri. Persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri sebesar 87,12 persen pada tahun 2020, persentase ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 87,58 persen. Sedangkan persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri sekitar 12 persen.

Kepemilikan bangunan berdasarkan status tempat tinggal biasanya dikaitkan dengan istilah *backlog*. Data *backlog* dalam perumahan bisa berdasarkan dari tingkat hunian dan kepemilikan bangunan tempat tinggal, jika data *backlog* yang digunakan bersumber dari BPS berarti data *backlog* tersebut dihitung berdasarkan kepemilikan bangunan tempat tinggal bukan dari tingkat hunian. *Backlog* merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam Renstra atau RPJMN di bidang perumahan. Indikator *backlog* biasanya digunakan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah penduduk yang ada di seluruh Indonesia.

Mengenai kebutuhan akan rumah hal ini selalu menjadi permasalahan terutama di wilayah perkotaan. Perputaran aktivitas perekonomian yang lebih tinggi di perkotaan banyak membuat penduduk di desa bermigrasi ke perkotaan untuk mencari nafkah, akibatnya kebutuhan akan rumah juga semakin tinggi. Keterbandingan antara jumlah penduduk yang tinggal di kota dengan lahan yang tersedia menjadikan tempat tinggal sebagai fokus utama dalam masalah perumahan oleh pemerintah. Berdasarkan data Susenas Maret 2020, persentase rumah tangga yang memiliki bangunan tempat tinggal dengan status milik sendiri di perkotaan sebesar 49,2 persen lebih sedikit jika dibandingkan di perdesaan yang sebesar 50,8 persen. Mereka lebih banyak tinggal di bangunan yang berstatus kontrak atau sewa dengan persentase sebanyak 10 persen rumah tangga.



Tabel 1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020

Kabupaten/Kota	Milik Sendiri		Kontrak/Sewa		Bebas Sewa/Dinas		Milik Ortu/Famili/Lainnya	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Kab. Pacitan	96,96	95.77	1,06	2.16	1,98	2.07	0,00	0,00
2 Kab. Ponorogo	92,13	93.08	1,45	1.09	6,42	5.84	0,00	0,00
3 Kab. Trenggalek	97,18	94.98	0,95	0.29	1,87	4.73	0,00	0,00
4 Kab. Tulungagung	94,44	92.14	1,50	1.42	4,06	6.44	0,00	0,00
5 Kab. Blitar	94,21	92.09	0,98	1.43	4,81	6.47	0,00	0,00
6 Kab. Kediri	88,40	88.96	2,51	2.32	8,09	8.72	1,00	0,00
7 Kab. Malang	89,59	89.68	4,43	3.50	5,99	6.83	0,00	0,00
8 Kab. Lumajang	95,36	94.55	2,43	1.46	2,21	4.00	0,00	0,00
9 Kab. Jember	89,82	91.87	3,44	2.44	6,74	5.69	0,00	0,00
10 Kab. Banyuwangi	89,45	88.40	1,75	1.18	8,80	10.43	0,00	0,00
11 Kab. Bondowoso	95,76	96.14	0,42	1.96	3,82	1.90	0,00	0,00
12 Kab. Situbondo	93,16	89.19	2,03	1.51	4,81	9.30	0,00	0,00
13 Kab. Probolinggo	91,33	85.38	0,53	1.46	8,14	13.16	0,00	0,00
14 Kab. Pasuruan	92,64	91.58	3,72	3.54	3,64	4.88	0,00	0,00
15 Kab. Sidoarjo	80,82	80.75	15,65	11.58	3,53	7.67	0,00	0,00
16 Kab. Mojokerto	91,64	92.14	5,40	4.14	2,96	3.72	0,00	0,00
17 Kab. Jombang	89,65	86.36	2,31	3.77	8,04	9.87	0,00	0,00
18 Kab. Nganjuk	89,34	91.14	1,86	1.98	8,80	6.88	0,00	0,00
19 Kab. Madiun	90,74	91.08	0,54	1.48	8,71	7.45	0,00	0,00
20 Kab. Magetan	94,16	93.85	1,72	1.38	4,13	4.76	0,00	0,00
21 Kab. Ngawi	92,03	90.62	0,77	0.65	7,20	8.73	0,00	0,00
22 Kab. Bojonegoro	96,43	95.80	0,88	1.33	2,69	2.87	0,00	0,00
23 Kab. Tuban	95,23	93.84	1,53	1.17	3,24	4.99	0,00	0,00
24 Kab. Lamongan	93,70	93.98	1,75	0.95	4,34	5.07	0,21	0,00
25 Kab. Gresik	86,92	85.01	10,00	8.80	3,08	6.18	0,00	0,00
26 Kab. Bangkalan	97,94	94.17	0,74	1.92	1,31	3.91	0,00	0,00
27 Kab. Sampang	94,09	93.30	1,00	1.40	4,92	5.30	0,00	0,00
28 Kab. Pamekasan	93,25	93.47	0,58	0.63	6,17	5.90	0,00	0,00
29 Kab. Sumenep	95,58	95.42	1,98	0.69	2,44	3.89	0,00	0,00
71 Kota Kediri	71,58	72.74	11,16	10.84	17,25	16.43	0,00	0,00
72 Kota Blitar	76,41	77.73	12,73	8.33	10,86	13.94	0,00	0,00
73 Kota Malang	63,55	63.36	27,86	25.67	8,59	10.97	0,00	0,00
74 Kota Probolinggo	90,35	89.67	6,10	5.28	3,55	5.06	0,00	0,00
75 Kota Pasuruan	77,86	79.96	12,10	11.85	10,03	8.19	0,00	0,00
76 Kota Mojokerto	73,11	73.43	11,42	11.04	15,47	15.53	0,00	0,00
77 Kota Madiun	63,48	63.29	19,91	15.44	16,62	21.27	0,00	0,00
78 Kota Surabaya	51,68	54.40	30,47	31.74	17,86	13.86	0,00	0,00
79 Kota Batu	87,04	87.38	6,61	6.39	6,35	6.23	0,00	0,00
Jawa Timur	87,58	87.12	6,02	5.65	6,35	7.23	0,05	0,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2019-2020.



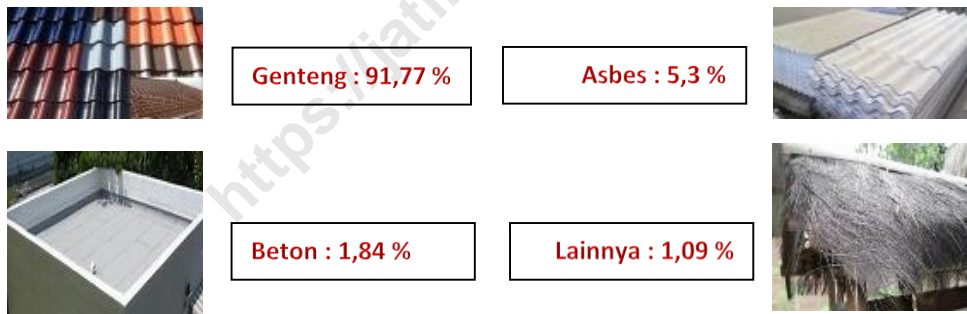
3.2 Kondisi Fisik Bangunan

3.2.1. Penggunaan Atap Terluas

Penggunaan atap untuk sebuah bangunan rumah biasanya terpengaruh dengan kondisi wilayah atau kebiasaan di masing-masing daerah. Ada yang menggunakan seng, sirap, ijuk/rumbia dan pada umumnya di Indonesia khususnya Jawa Timur penggunaan atap berasal dari jenis genteng.

Penggunaan atap genteng masih menempati posisi paling atas dengan persentase sebesar 91,77 persen. Genteng yang digunakan di Jawa Timur biasanya terbuat dari keramik, metal, tanah liat tradisional maupun dari *fiber/polycarbonate*. Pada beberapa wilayah di Jawa Timur rumah tangga ada yang menggunakan atap dari beton dan asbes masing-masing sebesar 1,84 persen dan 5,30 persen. Beberapa diantaranya juga masih ada yang menggunakan atap dari jenis seng, bamboo, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia dengan persentase sebesar 1,09 persen.

Gambar 3. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Atap Terluas di Jawa Timur, 2020

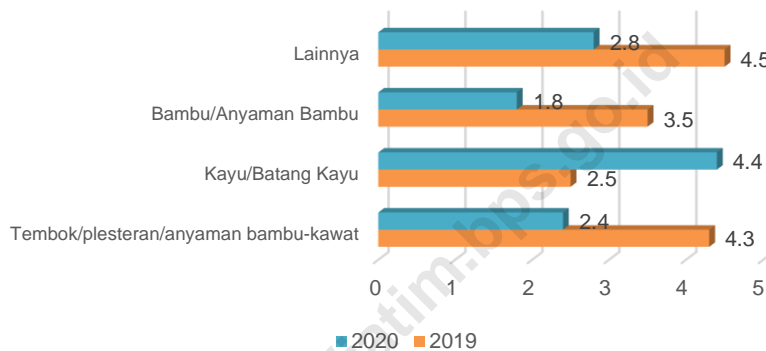


3.2.2. Penggunaan Dinding Terluas

Dinding biasanya digunakan sebagai penyekat diantara bangunan fisik lainnya. Dalam satu rumah tangga apabila menggunakan lebih dari satu jenis dinding dengan luas yang sama, maka jenis dinding yang terluas adalah yang bernilai lebih tinggi. Pada umumnya dinding yang digunakan oleh rumah tangga di Jawa Timur berupa tembok tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang menggunakan jenis dinding dari plesteran anyaman bamboo/kawat, kayu/papan, anyaman bamboo, batang kayu, bamboo dan jenis lain seperti dari seng, kardus, dan sebagainya.

Penggunaan dinding dari tembok, dari hasil Susenas Maret 2020 ada sebanyak 89,44 persen rumah tangga yang menggunakan. Persentase ini merupakan yang tertinggi dari pemakaian jenis dinding di Jawa Timur. Rumah tangga yang menggunakan jenis dinding dari kayu/batang kayu sebanyak 7,04 persen dan hanya 3,52 persen yang masih menggunakan dinding dari bamboo/anyaman, plesteran anyaman bamboo ataupun lainnya.

Gambar 4. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020

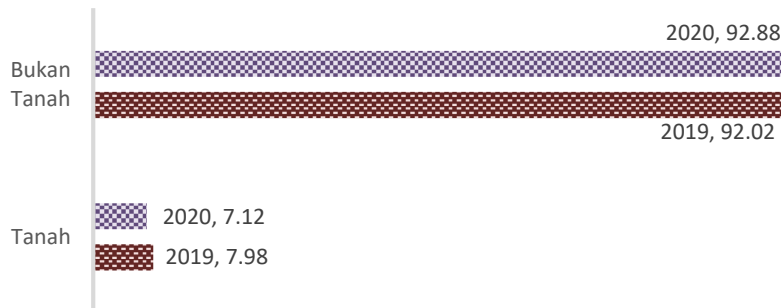


3.2.3. Penggunaan Lantai Terluas

Salah satu indikator komposit untuk rumah tidak layak huni dapat dilihat dari jenis lantai yang digunakan, yaitu lantai tanah termasuk diantaranya rumah tangga yang masih menggunakan lantai dari pasir atau batu. Tahun 2020 rumah tangga yang menggunakan lantai tanah mengalami kecenderungan untuk turun jika dibandingkan tahun 2019. Persentase rumah tangga dengan lantai tanah untuk tahun ini sebesar 7,12 persen menurun dari 7,98. Sedangkan lantai bukan tanah yang dicatat pada Susenas seperti marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bamboo.

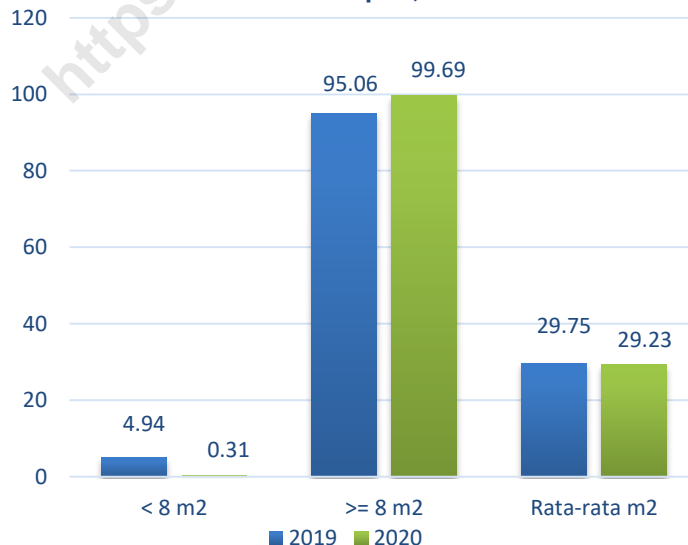
Sejauh ini mayoritas rumah tangga sudah beralih ke lantai dengan kualitas yang lebih baik. Penggunaan lantai bukan tanah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang diperlihatkan pada gambar 4, bahwa penggunaan lantai bukan tanah meningkat dari 92,02 persen pada tahun 2019 menjadi 92,88 persen pada tahun 2020.

Gambar 5. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Lantai Terluas di Jawa Timur, 2019-2020



Menurut Kemenkes kategori rumah yang sehat salah satunya adalah rumah yang memiliki luas lantai minimum 8 m² perkapita. Persentase rumah tangga yang memiliki luas lantai kurang dari 8 m² sebesar 0,31 persen dan yang lebih dari 8 m² sebesar 99,69 persen. Sedangkan secara rata-rata tiap penduduk di Jawa Timur menempati luas lantai sebesar 29,23 m².

Gambar 6. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Perkapita, 2019-2020



Tabel 2 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Rumah/Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020

Kabupaten/Kota	Beton		Genteng		Asbes		Lainnya	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Kab. Pacitan	0,88	0,44	94,78	96,40	3,04	2,45	1,30	0,71
2 Kab. Ponorogo	0,75	0,81	97,58	97,74	0,82	1,03	0,85	0,42
3 Kab. Trenggalek	2,33	4,46	95,47	91,89	1,92	2,37	0,27	1,27
4 Kab. Tulungagung	0,86	1,39	97,88	95,53	1,09	2,79	0,17	0,28
5 Kab. Blitar	0,75	1,40	96,27	96,68	2,23	1,75	0,74	0,17
6 Kab. Kediri	0,59	1,83	98,07	93,51	1,14	3,84	0,19	0,82
7 Kab. Malang	2,51	3,13	94,64	92,48	2,67	3,72	0,17	0,67
8 Kab. Lumajang	1,57	1,58	94,48	96,22	2,75	1,83	1,20	0,36
9 Kab. Jember	0,16	0,66	98,82	96,97	0,54	1,60	0,48	0,78
10 Kab. Banyuwangi	1,13	0,29	95,34	95,91	2,80	2,89	0,73	0,92
11 Kab. Bondowoso	0,46	0,98	96,27	95,32	1,16	2,27	2,11	1,44
12 Kab. Situbondo	0,00	0,42	90,76	87,79	5,99	8,40	3,25	3,40
13 Kab. Probolinggo	0,26	0,11	95,22	97,09	3,57	2,29	0,95	0,51
14 Kab. Pasuruan	2,40	1,18	86,73	89,84	7,38	5,85	3,49	3,13
15 Kab. Sidoarjo	2,91	3,13	85,96	85,91	10,50	9,90	0,63	1,06
16 Kab. Mojokerto	1,53	1,44	95,38	94,05	2,70	3,92	0,40	0,59
17 Kab. Jombang	1,24	1,31	94,23	93,02	4,03	4,68	0,50	0,99
18 Kab. Nganjuk	1,52	1,60	96,48	94,62	1,86	2,66	0,14	1,11
19 Kab. Madiun	1,57	1,02	96,35	97,68	1,01	0,94	1,07	0,36
20 Kab. Magetan	0,74	0,35	97,01	99,31	0,74	0,34	1,51	0,00
21 Kab. Ngawi	0,24	0,09	98,73	99,64	0,67	0,17	0,36	0,11
22 Kab. Bojonegoro	1,83	1,57	96,17	96,23	1,18	1,31	0,82	0,89
23 Kab. Tuban	1,29	1,33	94,64	95,84	3,64	2,54	0,43	0,28
24 Kab. Lamongan	3,97	5,77	93,93	91,20	1,56	2,20	0,55	0,83
25 Kab. Gresik	4,71	5,26	82,71	84,12	12,21	9,62	0,37	1,00
26 Kab. Bangkalan	0,61	1,40	98,71	96,75	0,47	0,64	0,21	1,22
27 Kab. Sampang	1,15	0,63	98,05	98,17	0,80	1,20	0,00	0,00
28 Kab. Pamekasan	0,00	0,14	98,08	96,71	1,85	2,64	0,07	0,51
29 Kab. Sumenep	0,91	1,04	96,39	96,60	2,46	1,96	0,23	0,39
71 Kota Kediri	2,57	1,53	91,01	87,81	5,72	8,70	0,70	1,97
72 Kota Blitar	2,92	3,21	91,12	92,53	5,25	4,01	0,71	0,26
73 Kota Malang	3,55	2,20	87,53	89,01	6,34	4,57	2,58	4,22
74 Kota Probolinggo	0,39	0,13	97,65	98,91	1,96	0,71	0,00	0,25
75 Kota Pasuruan	6,38	2,63	91,50	95,96	2,12	0,94	0,00	0,47
76 Kota Mojokerto	1,64	0,54	86,74	87,25	9,98	10,08	1,63	2,13
77 Kota Madiun	0,76	2,13	95,92	94,66	2,14	2,08	1,19	1,13
78 Kota Surabaya	3,80	3,35	69,15	64,87	25,33	29,19	1,73	2,59
79 Kota Batu	12,43	10,42	80,43	79,37	4,99	7,35	2,14	2,86
Jawa Timur	1,75	1,84	92,52	91,77	4,86	5,30	0,87	1,09

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2019-2020.



Tabel 3 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020

Kabupaten/Kota	Tembok/plester-an/anyaman bambu-kawat		Kayu/batang kayu		Bambu/anya m-an bambu		Lainnya	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Kab. Pacitan	84,81	84.70	12,27	12.07	2,93	3.23	0,00	0.00
2 Kab. Ponorogo	92,33	95.94	3,24	2.26	3,14	1.79	1,29	0.00
3 Kab. Trenggalek	93,98	93.43	3,58	4.58	2,26	0.98	0,17	1.01
4 Kab. Tulungagung	96,20	95.57	0,96	1.10	2,83	2.85	0,00	0.48
5 Kab. Blitar	94,57	95.09	3,12	2.98	2,31	1.84	0,00	0.09
6 Kab. Kediri	97,28	97.81	0,71	0.70	1,85	1.18	0,15	0.31
7 Kab. Malang	96,87	96.72	1,53	2.09	1,60	1.01	0,00	0.18
8 Kab. Lumajang	96,13	95.99	1,35	0.69	2,52	2.99	0,00	0.32
9 Kab. Jember	89,25	92.69	3,00	1.03	7,75	5.82	0,00	0.46
10 Kab. Banyuwangi	92,82	92.30	1,27	4.10	4,85	3.59	1,05	0.00
11 Kab. Bondowoso	69,09	64.46	17,34	19.10	13,57	16.43	0,00	0.00
12 Kab. Situbondo	59,31	59.31	30,59	35.19	6,86	5.51	3,24	0.00
13 Kab. Probolinggo	83,49	86.28	5,92	4.84	4,83	2.94	5,76	5.93
14 Kab. Pasuruan	96,02	95.24	2,15	4.46	0,88	0.30	0,95	0.00
15 Kab. Sidoarjo	99,02	98.90	0,46	0.66	0,51	0.35	0,00	0.09
16 Kab. Mojokerto	95,98	97.57	1,52	0.93	2,50	1.50	0,00	0.00
17 Kab. Jombang	93,05	93.24	5,27	5.54	1,68	1.22	0,00	0.00
18 Kab. Nganjuk	86,96	92.82	11,27	6.48	1,53	0.70	0,24	0.00
19 Kab. Madiun	91,22	90.98	7,89	7.93	0,88	0.53	0,00	0.56
20 Kab. Magetan	99,18	98.86	0,43	1.14	0,39	0.00	0,00	0.00
21 Kab. Ngawi	66,18	67.70	29,66	30.16	3,84	1.40	0,32	0.75
22 Kab. Bojonegoro	52,52	55.80	43,52	40.10	3,95	4.10	0,00	0.00
23 Kab. Tuban	75,40	73.70	21,00	21.97	3,60	3.86	0,00	0.47
24 Kab. Lamongan	85,33	84.29	12,13	11.97	2,33	3.34	0,21	0.40
25 Kab. Gresik	93,57	95.32	5,82	4.33	0,61	0.31	0,00	0.04
26 Kab. Bangkalan	77,57	79.79	13,75	11.00	3,39	5.67	5,29	3.55
27 Kab. Sampang	67,25	67.11	20,68	22.32	5,93	5.35	6,15	5.23
28 Kab. Pamekasan	82,70	87.32	2,76	1.33	9,15	6.89	5,39	4.45
29 Kab. Sumenep	90,21	92.26	6,89	5.72	2,90	1.82	0,00	0.20
71 Kota Kediri	99,17	99.54	0,14	0.36	0,69	0.10	0,00	0.00
72 Kota Blitar	98,16	99.28	1,41	0.57	0,44	0.15	0,00	0.00
73 Kota Malang	98,84	99.01	0,59	0.57	0,57	0.00	0,00	0.42
74 Kota Probolinggo	98,83	98.81	0,91	0.45	0,12	0.74	0,14	0.00
75 Kota Pasuruan	99,01	98.77	0,84	1.04	0,15	0.19	0,00	0.00
76 Kota Mojokerto	97,32	97.35	0,88	0.99	1,80	1.66	0,00	0.00
77 Kota Madiun	98,38	99.19	1,37	0.53	0,15	0.28	0,09	0.00
78 Kota Surabaya	96,95	97.00	2,57	2.12	0,43	0.34	0,05	0.54
79 Kota Batu	99,25	98.26	0,75	0.94	0,00	0.44	0,00	0.36
Jawa Timur	89,08	89,82	7,19	7,04	3,00	2,49	0,73	0,65

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2019-2020.



Tabel 4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020

Kabupaten/Kota	Bukan tanah		Tanah	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kab. Pacitan	89,89	92.54	10,11	7.46
2 Kab. Ponorogo	86,73	92.69	13,27	7.31
3 Kab. Trenggalek	92,03	94.33	7,97	5.67
4 Kab. Tulungagung	96,22	97.43	3,78	2.57
5 Kab. Blitar	96,83	95.66	3,17	4.34
6 Kab. Kediri	96,99	97.25	3,01	2.75
7 Kab. Malang	96,27	96.58	3,73	3.42
8 Kab. Lumajang	97,53	98.82	2,46	1.18
9 Kab. Jember	95,40	93.85	4,60	6.15
10 Kab. Banyuwangi	94,45	95.81	5,55	4.19
11 Kab. Bondowoso	87,61	84.40	12,39	15.60
12 Kab. Situbondo	82,92	85.76	17,08	14.24
13 Kab. Probolinggo	85,06	85.96	14,94	14.04
14 Kab. Pasuruan	97,15	96.54	2,85	3.46
15 Kab. Sidoarjo	99,20	99.58	0,80	0.42
16 Kab. Mojokerto	94,55	95.62	5,45	4.38
17 Kab. Jombang	92,85	93.15	7,15	6.85
18 Kab. Nganjuk	85,08	89.14	14,92	10.86
19 Kab. Madiun	88,64	86.93	11,36	13.07
20 Kab. Magetan	97,59	96.81	2,42	3.19
21 Kab. Ngawi	67,73	71.48	32,27	28.52
22 Kab. Bojonegoro	64,19	66.75	35,81	33.25
23 Kab. Tuban	83,42	81.52	16,58	18.48
24 Kab. Lamongan	90,64	90.37	9,36	9.63
25 Kab. Gresik	96,31	98.73	3,69	1.27
26 Kab. Bangkalan	90,98	89.90	9,02	10.10
27 Kab. Sampang	76,03	79.90	23,97	20.10
28 Kab. Pamekasan	81,95	90.14	18,05	9.86
29 Kab. Sumenep	94,85	97.82	5,15	2.18
71 Kota Kediri	99,68	99.47	0,32	0.53
72 Kota Blitar	99,30	99.60	0,71	0.40
73 Kota Malang	99,57	100.00	0,43	0.00
74 Kota Probolinggo	99,72	98.37	0,28	1.63
75 Kota Pasuruan	98,84	99.03	1,16	0.97
76 Kota Mojokerto	99,47	99.15	0,53	0.85
77 Kota Madiun	98,88	99.80	1,12	0.20
78 Kota Surabaya	99,63	99.93	0,37	0.07
79 Kota Batu	99,29	97.69	0,71	2.31
Jawa Timur	92,02	92,88	7,98	7,12

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2019-2020.



3.3 Fasilitas yang Dimiliki Oleh Rumah Tangga

3.3.1. Sumber Air Untuk Minum

Salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting bagi siklus kehidupannya adalah air. Begitupun rumah tangga, kebutuhan akan air terutama untuk minum sangat mutlak diperlukan. Sumber air minum adalah sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Di dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional, air untuk minum terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya air dalam kemasan/isi ulang, leding/pompa, sumur/mata air terlindung, sumur/mata air tak terlindung dan air permukaan/air hujan/lainnya. Apabila rumah tangga menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka dipilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga.

Tabel 5. Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Berdasarkan Penggunaan Sumber Air Untuk Minum, 2019-2020

Uraian	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Air dalam Kemasan	32,92	34,15
Leding/Pompa	32,63	35,50
Sumur/Mata Air Terlindung	29,83	26,44
Sumur/Mata Air Tak Terlindung	4,12	3,54
Air Permukaan/Hujan/lainnya	0,50	0,37

Sumber air utama untuk minum oleh rumah tangga di Jawa Timur banyak yang menggunakan leding/pompa, dengan persentase sebesar 35,50 persen kemudian air dalam kemasan/isi ulang sebesar 34,15 persen dan sumur/mata air terlindung sebesar 26,44 persen. Walaupun sudah banyak yang menggunakan sumber utama air minum dari air bersih tetapi masih ada juga yang menggunakan sumber air dari sumur/mata air tak terlindung dengan persentase sebesar 3,54 persen.

3.3.2. Sumber Air Untuk Mandi/Cuci/DII

Sama halnya dengan sumber utama air untuk minum, air yang digunakan oleh rumah tangga untuk mandi, mencuci, memasak, menyiram tanaman dan lain-lain berasal dari air kemasan, leding/pompa, sumur/mata air terlindung, sumur/mata air tak



terlindung dan air permukaan/air hujan/lainnya. Rumah tangga di Jawa Timur banyak menggunakan leding/pompa dan sumur/mata air terlindung sebagai sumber air utama untuk mandi, mencuci dan lain-lain masing-masing sebesar 62,21 persen dan 31,53 persen. Sebagian kecil rumah tangga ada juga yang menggunakan air dalam kemasan untuk mandi/cuci/dll yaitu sebesar 0,09 persen, sumur/mata air tidak terlindung sebesar 4,01 persen dan yang menggunakan air permukaan atau air hujan atau air lainnya sebesar 2,15 persen.

Tabel 6. Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Berdasarkan Penggunaan Sumber Air Untuk Mandi/Cuci/Dll, 2019-2020

Uraian	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Air dalam Kemasan	0,32	0,09
Leding/Pompa	57,46	62,21
Sumur/Mata Air Terlindung	34,82	31,53
Sumur/Mata Air Tak Terlindung	4,43	4,01
Air Permukaan/Hujan/lainnya	2,98	2,15

3.3.3. Jarak Sumber Air Minum dan Sumber Air Mandi/Cuci/Dll ke Tempat Penampungan Akhir Kotoran

Jarak sumur dengan tempat penampungan akhir kotoran menentukan kondisi kesehatan dari anggota rumah tangga. Standar jarak dari tempat penampungan akhir kotoran (*septic tank*) ke sumur air bersih yang ditentukan oleh Departemen Pekerjaan Umum adalah 10 meter. Kenyataan di masyarakat sangatlah bertolak belakang, karena masih banyak ditemukan jarak antara sumber air minum dan tempat penampungan kotoran dibawah 10 meter. Dari sisi kesehatan jarak yang dekat tersebut sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat, karena jarak yang dekat bisa menyebabkan air minum tercemar, tidak hanya bakteri *Escherichia Coli* tapi juga zat kimia berbahaya yang dapat mencemari air. Alasan yang menyebabkan jarak dekat tersebut salah satunya adalah wilayah padat penduduk seperti di perkotaan.

Jarak sumber air minum ke tempat penampungan limbah/kotoran terdekat tidak hanya dilihat dari tempat penampungan di rumah yang ditempati rumah tangga tetapi juga melihat dari rumah tempat penampungan di rumah tetangga. Jika tempat



penampungan limbah/kotoran milik tetangga lebih dekat dengan sumber air minum rumah tangga maka yang dihitung jarak terdekat adalah jarak tersebut. Persentase rumah tangga yang memiliki jarak lebih dari 10 meter sebesar 66,33 persen sedangkan yang kurang dari 10 meter sebesar 29,74 persen, selebihnya menjawab tidak tahu (3,93 persen).

Pencatatan jarak dari sumber air untuk memasak dengan tempat penampungan akhir kotoran tidak berbeda dengan jarak pada sumber air minum. Persentase yang memiliki jarak sumber air untuk memasak lebih dari atau sama dengan 10 m di tahun 2020 sebesar 64,18 persen sedangkan yang kurang dari 10 meter sebesar 31,60 persen, selebihnya menjawab tidak tahu (4,22 persen).

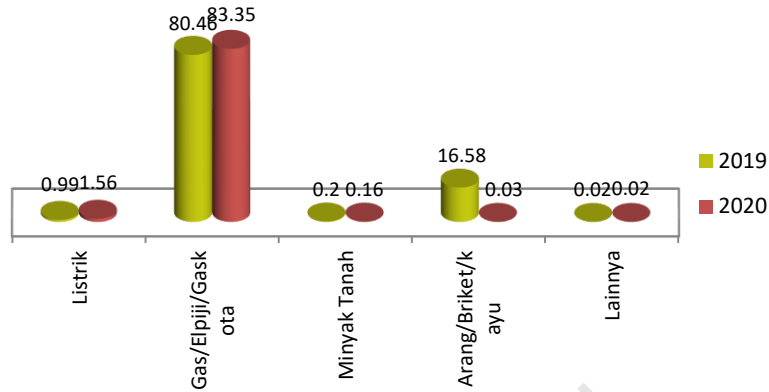
Tabel 7. Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Berdasarkan Jarak Sumber Air Utama Untuk Memasak dan Minum ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2020

Sumber Air Utama	Jarak ke tempat penampungan Kotoran/Limbah	
	< 10 m	>= 10 m
(1)	(2)	(3)
Untuk Air Minum	29,74	66,33
Untuk Mandi/Cuci/dll	31,60	64,18

3.3.4. Bahan Bakar Untuk Memasak

Penggunaan bahan bakar tidak terlepas dari kegiatan memasak di rumah tangga. Dalam Susenas Maret 2020 penggunaan bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak meliputi listrik, gas, elpiji, gas kota, minyak tanah, arang, briket, kayu dan lainnya. Gas/Elpiji/Gas Kota merupakan jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Jawa Timur dengan persentase sebesar 83,35 persen, selebihnya ada yang menggunakan listrik, minyak tanah, arang/briket/kayu dan lainnya walaupun dengan persentase yang sangat kecil. Pada tahun 2020 masih terdapat rumah tangga yang tidak memasak dengan persentase sebesar 0,02 persen.

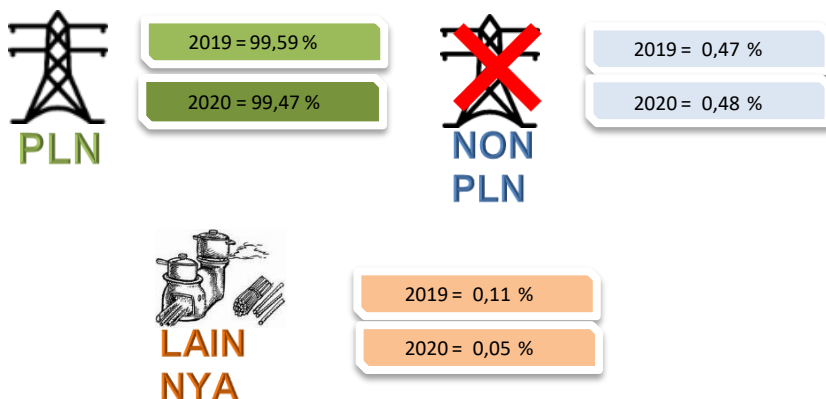
Gambar 7. Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak, 2019-2020



3.3.5. Sumber Penerangan

Sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga utamanya berasal dari listrik yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), ada sekitar 99,47 persen rumah tangga yang menggunakan listrik dari PLN. Sumber penerangan lain berasal dari non PLN sekitar 0,48 persen rumah tangga menggunakan sumber penerangan tersebut. Walaupun penerangan listrik dari PLN sudah hampir merata di seluruh kabupaten/kota tetapi ada sebagian kecil rumah tangga yang masih menggunakan sumber penerangan diluar listrik seperti petromak, aladin, pelita, sentir, obor dan lain.lain. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada grafik diatas.

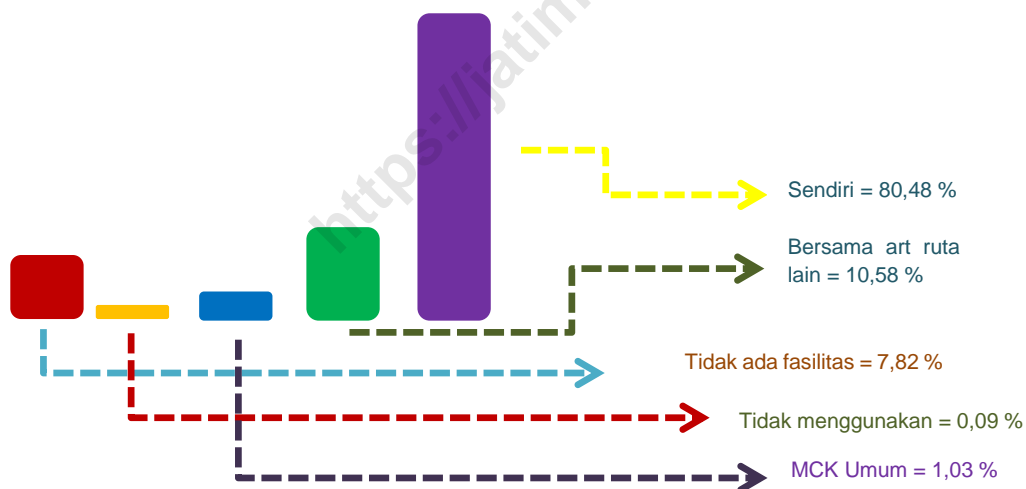
Gambar 8. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Sumber Penerangan 2019-2020



3.3.6. Fasilitas BAB (Buang Air Besar)

Fasilitas BAB merupakan ketersediaan jamban/kloset yang dapat digunakan oleh rumah tangga. Ketersediaan jamban/kloset tidak hanya yang berada di dalam bangunan sensus tetapi juga yang berada di luar bangunan sensus. Tahun 2020 sebesar 7,82 persen tidak tersedia fasilitas BAB selebihnya yaitu sebesar 92,18 persen rumah tangga sudah tersedia fasilitas tersebut. Diantara rumah tangga yang sudah tersedia fasilitas BAB diantaranya ada yang digunakan hanya untuk anggota rumah tangga (art) itu sendiri (80,48 persen), ada yang digunakan bersama art rumah tangga lain tertentu (10,58 persen), ada yang menggunakan di MCK umum (1,03 persen) dan ada rumah tangga yang tersedia fasilitas untuk buang air besar tetapi tidak menggunakannya (0,09). Untuk kondisi yang terakhir ini, biasanya mereka membuang kotoran di sungai/kali di sungai, kali, pantai, sawah atau di tempat lainnya. atau di tempat lain yang sudah menjadi kebiasaan mereka.

Gambar 9. Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat BAB dan Penggunaannya, 2020

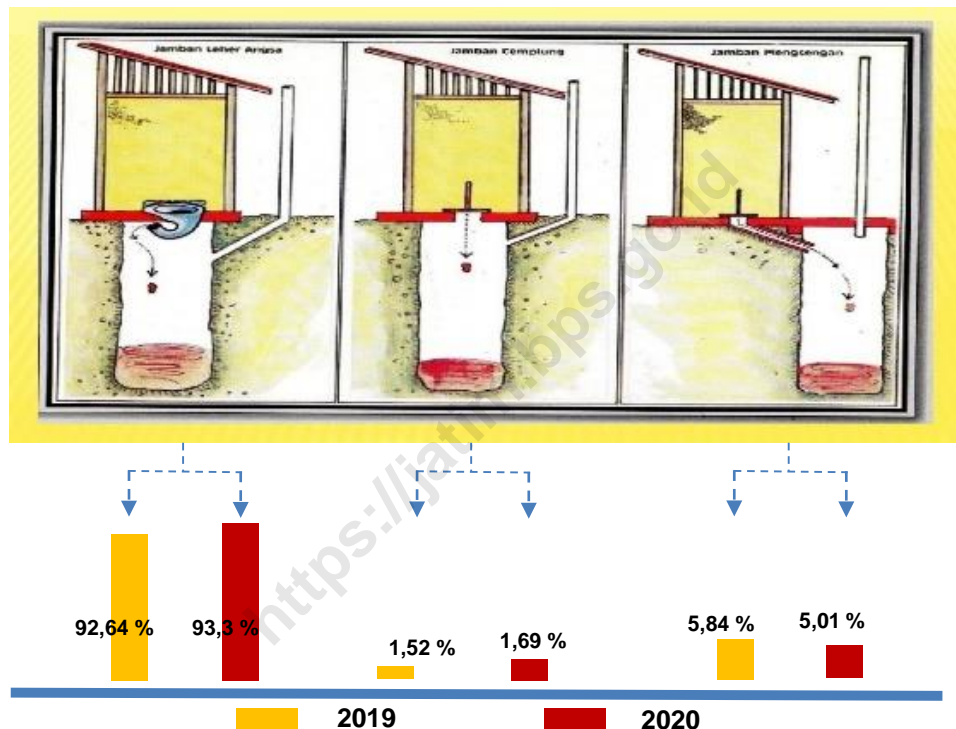


3.3.7. Jenis Kloset yang Digunakan

Berdasarkan jenisnya, kloset yang digunakan oleh rumah tangga terbagi menjadi leher angsa, plengsengan, dan cemplung/cubluk. Rata-rata rumah tangga menggunakan kloset leher angsa, ada sekitar 93,30 persen rumah tangga yang menggunakan jenis tersebut. Kemudian kloset jenis plengsengan digunakan sekitar 1,69 persen dan cemplung/cubluk sekitar 5,01 persen. Penggunaan kloset leher angsa persentasenya

semakin meningkat setiap tahun. Beberapa kabupaten/kota angkanya sudah ada yang mencapai seratus persen, bisa diasumsikan bahwa seluruh rumah tangga yang terpilih dalam pendataan Susenas 2020 telah menggunakan jenis kloset leher angsa, informasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel lampiran.

Gambar 10. Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Berdasarkan Penggunaan Jenis Kloset, 2019-2020



3.3.8. Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Tersedianya tempat pembuangan akhir kotoran sangatlah penting dalam suatu rumah tangga. Dilihat dari sisi kesehatan, kotoran manusia dapat menjadi masalah yang tidak bisa dianggap sepele. Pembuangan kotoran manusia (tinja) secara sembarangan dapat mengakibatkan kontaminasi pada sarana air bersih dan akan mendatangkan bahaya bagi kesehatan anggota rumah tangga. Biasanya rumah tangga yang membuang tinja secara sembarangan disebabkan karena pengetahuan mereka akan kesehatan

lingkungan yang sangat kurang, tingkat sosial ekonomi yang rendah dan kebiasaan buruk yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Pada tahun 2020, masih ada rumah tangga yang membuang kotorannya di kolam, sawah, sungai, laut, lubang tanah, pantai, tanah lapang, kebun dan ditempat lainnya diluar yang disebutkan sebelumnya dengan persentase sebesar 15,25 persen. Sedangkan rumah tangga yang sudah membuang kotoran melalui tangki/IPAL sebesar 84,75 persen meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 8. Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja, 2019-2020

Uraian	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Tangki/IPAL	80,46	84,75
Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	3,05	3,02
Lubang Tanah	16,23	12,00
Pantai/TanahLapang/Kebun	0,25	0,19
Lainnya	0,00	0,04

Tabel 9. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020

Kabupaten/Kota	Sumber Air Utama untuk Minum									
	Air Dalam Kemasan/Isi Ulang		Leding/Pompa		Sumur/Mata Air Terlindung		Sumur/Mata Air Tak Terlindung		Air Permukaan/Hujan/Lainnya	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kab. Pacitan	12,48	7,17	14,19	17,65	51,80	59,79	20,26	13,97	1,28	1,42
2 Kab. Ponorogo	19,87	26,42	37,27	44,53	35,88	20,21	6,98	8,59	0,00	0,26
3 Kab. Trenggalek	10,95	15,62	15,45	17,76	55,39	48,07	18,21	18,55	0,00	0,00
4 Kab. Tulungagung	24,66	24,76	39,73	44,20	33,89	28,32	1,73	2,73	0,00	0,00
5 Kab. Blitar	8,38	10,78	22,73	33,15	61,88	51,51	6,91	4,55	0,10	0,00
6 Kab. Kediri	12,75	18,51	69,15	63,60	15,94	16,95	2,16	0,94	0,00	0,00
7 Kab. Malang	9,37	5,97	27,00	32,23	62,04	57,39	1,58	4,20	0,00	0,20
8 Kab. Lumajang	7,03	4,54	24,75	35,58	61,09	54,07	5,77	3,60	1,36	2,21
9 Kab. Jember	14,60	16,37	25,29	33,10	53,74	41,30	6,18	9,16	0,19	0,06
10 Kab. Banyuwangi	18,57	22,30	39,36	35,82	36,92	35,04	5,03	6,85	0,11	0,00
11 Kab. Bondowoso	2,75	5,20	39,32	42,39	50,85	44,25	4,37	8,16	2,70	0,00
12 Kab. Situbondo	9,27	8,03	66,16	64,39	20,86	23,76	3,58	3,82	0,14	0,00
13 Kab. Probolinggo	14,41	10,16	58,31	55,89	17,74	26,34	9,28	6,96	0,27	0,64
14 Kab. Pasuruan	18,79	18,56	34,35	46,03	40,05	32,76	5,44	2,65	1,37	0,00
15 Kab. Sidoarjo	69,60	73,22	7,40	7,19	22,21	19,18	0,78	0,18	0,00	0,23
16 Kab. Mojokerto	37,49	39,06	40,67	41,99	21,08	18,51	0,77	0,43	0,00	0,00
17 Kab. Jombang	37,21	42,99	43,15	45,70	14,71	10,96	4,93	0,36	0,00	0,00
18 Kab. Nganjuk	26,78	26,11	47,57	62,55	24,08	11,03	1,57	0,31	0,01	0,00
19 Kab. Madiun	26,99	28,84	54,41	53,31	16,01	15,87	1,79	1,73	0,79	0,25
20 Kab. Magetan	12,28	10,47	55,55	62,95	31,13	26,03	1,04	0,54	0,00	0,00
21 Kab. Ngawi	30,57	34,26	32,74	40,75	33,52	24,48	3,17	0,37	0,00	0,14
22 Kab. Bojonegoro	49,76	55,21	40,98	33,96	7,84	8,50	1,24	2,34	0,18	0,00
23 Kab. Tuban	52,36	53,07	37,01	32,68	7,74	12,89	2,16	1,36	0,72	0,00
24 Kab. Lamongan	72,26	75,61	18,46	15,11	4,03	3,75	0,43	0,94	4,82	4,60
25 Kab. Gresik	93,60	93,56	4,96	5,40	1,02	0,13	0,00	0,00	0,42	0,91
26 Kab. Bangkalan	27,12	28,73	22,66	32,35	41,52	34,38	8,03	4,54	0,67	0,00
27 Kab. Sampang	13,27	16,86	33,90	39,45	34,22	32,45	14,16	7,54	4,45	3,70
28 Kab. Pamekasan	10,02	14,76	29,34	40,91	45,42	34,95	15,22	9,38	0,00	0,00
29 Kab. Sumenep	11,52	11,23	41,83	41,57	42,07	45,43	4,49	1,77	0,09	0,00
71 Kota Kediri	42,79	36,39	56,79	59,27	0,27	4,23	0,15	0,11	0,00	0,00
72 Kota Blitar	32,86	28,63	20,52	25,54	43,30	44,20	3,31	1,63	0,00	0,00
73 Kota Malang	50,49	48,92	40,83	44,30	8,28	6,78	0,40	0,00	0,00	0,00
74 Kota Probolinggo	58,56	56,91	41,43	42,38	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Kota Pasuruan	45,21	46,10	53,62	52,51	0,72	1,39	0,45	0,00	0,00	0,00
76 Kota Mojokerto	77,47	80,59	21,34	19,32	0,65	0,10	0,54	0,00	0,00	0,00
77 Kota Madiun	76,00	69,78	23,58	29,67	0,42	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Kota Surabaya	89,81	90,33	10,13	9,14	0,06	0,32	0,00	0,21	0,00	0,00
79 Kota Batu	14,30	10,06	26,70	26,36	54,11	62,60	4,89	0,98	0,00	0,00
Jawa Timur	32,92	34,15	32,63	35,50	29,83	26,44	4,12	3,54	0,50	0,37

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2019-2020.



Tabel 10. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Memasak menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020

Kabupaten/Kota		Sumber Air Utama untuk Memasak									
		Air Dalam Kemasan		Leding/Pompa		Sumur/Mata Air Terlindung		Sumur/Mata Air Tak Terlindung		Air Permukaan/Hujan/Lainnya	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kab. Pacitan	0,00	0,00	16,74	21,25	61,27	61,51	19,85	15,30	2,13	1,95
2	Kab. Ponorogo	0,00	0,00	55,59	68,86	37,98	22,24	6,43	8,59	0,00	0,31
3	Kab. Trenggalek	0,14	0,00	20,66	24,67	56,88	54,98	21,79	20,15	0,54	0,20
4	Kab. Tulungagung	0,30	0,00	53,57	58,75	43,00	36,94	2,66	4,14	0,47	0,17
5	Kab. Blitar	0,13	0,00	23,93	38,44	69,31	56,25	6,60	5,31	0,03	0,00
6	Kab. Kediri	0,08	0,30	79,88	80,31	17,73	17,91	2,30	1,49	0,00	0,00
7	Kab. Malang	0,31	0,00	32,04	35,73	64,61	59,40	1,27	4,50	1,78	0,37
8	Kab. Lumajang	0,00	0,00	27,50	35,07	60,45	55,29	5,99	4,71	6,05	4,93
9	Kab. Jember	0,12	0,00	27,07	39,59	59,19	47,31	5,89	6,70	7,72	6,41
10	Kab. Banyuwangi	0,04	0,00	49,24	48,84	40,45	39,65	5,15	7,59	5,11	3,93
11	Kab. Bondowoso	0,05	0,00	35,62	38,29	44,09	41,61	4,31	8,63	15,92	11,47
12	Kab. Situbondo	0,00	0,00	70,95	65,23	19,31	25,56	2,45	4,77	7,29	4,43
13	Kab. Probolinggo	0,00	0,00	67,28	63,43	15,38	22,95	6,51	7,09	10,83	6,53
14	Kab. Pasuruan	0,32	0,00	46,83	56,64	45,47	39,97	5,42	2,96	1,96	0,43
15	Kab. Sidoarjo	0,58	0,00	62,20	70,08	35,25	28,98	1,82	0,86	0,15	0,08
16	Kab. Mojokerto	0,00	0,08	75,23	75,84	24,17	22,67	0,60	0,90	0,00	0,51
17	Kab. Jombang	0,00	0,00	72,38	85,02	21,57	13,92	6,05	1,05	0,00	0,00
18	Kab. Nganjuk	0,00	0,18	69,20	86,57	27,41	12,33	1,30	0,91	2,09	0,00
19	Kab. Madiun	1,26	0,00	76,03	80,65	18,86	16,58	2,02	2,45	1,84	0,33
20	Kab. Magetan	0,20	0,00	66,12	71,39	32,33	27,79	1,35	0,82	0,00	0,00
21	Kab. Ngawi	0,00	0,00	54,76	67,74	40,52	31,22	4,15	0,76	0,56	0,28
22	Kab. Bojonegoro	0,00	0,00	87,43	82,75	11,25	13,95	1,32	3,02	0,00	0,28
23	Kab. Tuban	0,05	0,00	80,55	75,79	14,61	21,15	3,02	2,15	1,77	0,90
24	Kab. Lamongan	0,68	0,00	58,20	67,95	24,85	19,09	4,95	3,53	11,31	9,43
25	Kab. Gresik	1,10	0,00	84,84	83,29	12,12	10,68	0,20	0,52	1,73	5,50
26	Kab. Bangkalan	1,31	0,00	39,26	47,79	47,38	42,97	7,11	4,84	4,94	4,40
27	Kab. Sampang	0,00	0,36	38,46	48,10	31,76	32,84	13,01	8,62	16,77	10,09
28	Kab. Pamekasan	0,00	0,00	34,27	50,11	49,45	38,37	16,06	10,99	0,21	0,53
29	Kab. Sumenep	0,00	0,00	51,14	48,63	41,80	47,64	6,54	3,26	0,52	0,47
71	Kota Kediri	0,20	0,00	98,71	94,22	1,09	5,45	0,00	0,33	0,00	0,00
72	Kota Blitar	0,00	0,00	35,88	42,49	59,68	55,41	4,45	2,10	0,00	0,00
73	Kota Malang	0,00	0,00	88,52	88,07	10,67	11,50	0,22	0,35	0,59	0,07
74	Kota Probolinggo	0,00	0,00	98,72	98,47	1,13	1,53	0,15	0,00	0,00	0,00
75	Kota Pasuruan	0,00	0,21	94,99	95,17	4,75	4,55	0,26	0,07	0,00	0,00
76	Kota Mojokerto	1,23	0,00	94,00	98,90	4,28	1,10	0,34	0,00	0,15	0,00
77	Kota Madiun	0,13	0,00	97,86	98,12	2,01	1,71	0,00	0,17	0,00	0,00
78	Kota Surabaya	1,50	0,87	87,50	86,20	9,88	12,66	1,03	0,26	0,09	0,00
79	Kota Batu	0,15	0,00	30,74	30,63	63,03	67,86	5,08	1,50	0,00	0,00
Jawa Timur		0,32	0,09	57,46	62,21	34,82	31,53	4,43	4,01	2,98	2,15

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2019-2020.



Tabel 11. Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019 – 2020

Kabupaten/Kota	Jarak Sumber Air Minum (pompa,sumur,mata air) ke Tempat Penampungan Kotoran					
	< 10 m		≥ 10 m		Tidak Tahu	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	14,06	24.07	85,03	74.13	0,91	1.81
2 Kab. Ponorogo	23,37	23.93	72,63	76.07	4,00	0.00
3 Kab. Trenggalek	27,70	24.79	69,47	72.28	2,82	2.93
4 Kab. Tulungagung	45,38	40.05	53,10	58.94	1,52	1.02
5 Kab. Blitar	28,20	29.49	69,36	67.79	2,44	2.72
6 Kab. Kediri	42,83	37.02	56,68	62.75	0,49	0.22
7 Kab. Malang	13,95	21.96	77,18	70.49	8,86	7.55
8 Kab. Lumajang	38,84	36.51	52,57	60.69	8,59	2.80
9 Kab. Jember	45,11	34.04	51,25	62.36	3,64	3.60
10 Kab. Banyuwangi	29,81	29.39	64,10	67.47	6,09	3.13
11 Kab. Bondowoso	33,45	24.99	62,88	70.00	3,67	5.01
12 Kab. Situbondo	40,68	40.18	56,32	58.35	3,00	1.47
13 Kab. Probolinggo	36,13	38.23	59,26	60.77	4,61	1.00
14 Kab. Pasuruan	37,09	43.08	56,04	52.01	6,87	4.90
15 Kab. Sidoarjo	20,90	13.62	61,01	57.64	18,09	28.74
16 Kab. Mojokerto	24,04	30.54	74,96	67.24	1,00	2.22
17 Kab. Jombang	33,91	34.97	64,59	62.87	1,50	2.16
18 Kab. Nganjuk	29,18	31.12	67,62	68.41	3,19	0.46
19 Kab. Madiun	22,07	24.03	76,94	72.76	0,99	3.21
20 Kab. Magetan	15,34	20.53	83,67	79.11	0,99	0.36
21 Kab. Ngawi	27,11	19.52	71,87	77.06	1,02	3.41
22 Kab. Bojonegoro	29,01	18.29	70,10	80.64	0,89	1.07
23 Kab. Tuban	25,97	23.17	71,70	72.66	2,33	4.16
24 Kab. Lamongan	37,63	16.61	60,08	77.42	2,29	5.96
25 Kab. Gresik	19,92	3.58	80,07	96.42	0,00	0.00
26 Kab. Bangkalan	43,10	41.34	51,08	51.78	5,82	6.88
27 Kab. Sampang	8,24	16.20	91,68	82.93	0,08	0.86
28 Kab. Pamekasan	15,69	14.83	83,68	84.36	0,63	0.82
29 Kab. Sumenep	34,05	21.95	59,39	69.67	6,55	8.39
71 Kota Kediri	45,54	60.33	53,74	36.66	0,72	3.02
72 Kota Blitar	40,86	54.02	57,00	44.72	2,14	1.26
73 Kota Malang	36,21	46.14	62,08	48.20	1,71	5.66
74 Kota Probolinggo	43,94	32.25	55,54	65.56	0,52	2.19
75 Kota Pasuruan	64,83	35.82	34,15	64.18	1,02	0.00
76 Kota Mojokerto	51,82	63.98	42,35	34.02	5,82	2.00
77 Kota Madiun	43,96	52.10	49,18	47.90	6,86	0.00
78 Kota Surabaya	64,77	62.28	35,30	31.30	0,00	6.42
79 Kota Batu	7,91	10.76	72,17	66.08	19,93	23.16
Jawa Timur	30,92	29,74	64,94	66,33	4,14	3,93

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2019-2020.



Tabel 12. Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Utama Untuk Mandi/Cuci/dll ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019 – 2020

Kabupaten/Kota	Jarak Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll ke Tempat Penampungan Kotoran					
	< 10 m		≥ 10 m		Tidak Tahu	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	14,67	24.07	84,69	74.13	0,63	1.81
2 Kab. Ponorogo	21,20	23.93	74,45	76.07	4,36	0.00
3 Kab. Trenggalek	28,16	24.79	69,31	72.28	2,53	2.93
4 Kab. Tulungagung	45,80	40.05	52,75	58.94	1,46	1.02
5 Kab. Blitar	27,17	29.49	70,26	67.79	2,57	2.72
6 Kab. Kediri	36,73	37.02	62,84	62.75	0,43	0.22
7 Kab. Malang	10,92	21.96	79,94	70.49	9,14	7.55
8 Kab. Lumajang	37,50	36.51	56,28	60.69	6,22	2.80
9 Kab. Jember	42,52	34.04	53,14	62.36	4,34	3.60
10 Kab. Banyuwangi	25,75	29.39	69,45	67.47	4,80	3.13
11 Kab. Bondowoso	33,89	24.99	62,61	70.00	3,50	5.01
12 Kab. Situbondo	42,89	40.18	53,87	58.35	3,25	1.47
13 Kab. Probolinggo	37,16	38.23	57,78	60.77	5,06	1.00
14 Kab. Pasuruan	35,69	43.08	57,07	52.01	7,23	4.90
15 Kab. Sidoarjo	26,33	13.62	65,55	57.64	8,12	28.74
16 Kab. Mojokerto	23,47	30.54	74,05	67.24	2,47	2.22
17 Kab. Jombang	32,83	34.97	66,13	62.87	1,05	2.16
18 Kab. Nganjuk	28,56	31.12	69,27	68.41	2,17	0.46
19 Kab. Madiun	24,33	24.03	74,58	72.76	1,09	3.21
20 Kab. Magetan	16,30	20.53	82,78	79.11	0,92	0.36
21 Kab. Ngawi	26,74	19.52	72,68	77.06	0,58	3.41
22 Kab. Bojonegoro	26,65	18.29	71,08	80.64	2,27	1.07
23 Kab. Tuban	27,36	23.17	70,96	72.66	1,68	4.16
24 Kab. Lamongan	32,97	16.61	62,39	77.42	4,63	5.96
25 Kab. Gresik	12,37	3.58	82,64	96.42	4,99	0.00
26 Kab. Bangkalan	45,21	41.34	45,98	51.78	8,81	6.88
27 Kab. Sampang	11,73	16.20	88,27	82.93	0,00	0.86
28 Kab. Pamekasan	17,47	14.83	81,75	84.36	0,78	0.82
29 Kab. Sumenep	29,92	21.95	62,97	69.67	7,10	8.39
71 Kota Kediri	44,43	60.33	54,05	36.66	1,51	3.02
72 Kota Blitar	43,44	54.02	51,43	44.72	5,13	1.26
73 Kota Malang	27,02	46.14	62,54	48.20	10,44	5.66
74 Kota Probolinggo	40,34	32.25	56,71	65.56	2,95	2.19
75 Kota Pasuruan	59,89	35.82	37,81	64.18	2,30	0.00
76 Kota Mojokerto	58,26	63.98	35,18	34.02	6,56	2.00
77 Kota Madiun	43,31	52.10	43,46	47.90	13,23	0.00
78 Kota Surabaya	51,66	62.28	30,04	31.30	18,31	6.42
79 Kota Batu	12,51	10.76	68,15	66.08	19,35	23.16
Jawa Timur	29,82	29,74	65,73	66,33	4,46	3,93

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2019-2020.



Tabel 13. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar Utama yang Digunakan Untuk Memasak Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020

Kabupaten/Kota	Bahan Bakar Utama											
	Listrik		Gas/Elpiji/Gas Kota		Minyak Tanah		Arang/Briket/Kayu		Lainnya		Tidak memasak	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Kab. Pacitan	0,46	0,30	33,19	35,49	0,00	0,00	65,57	63,88	0,00	0,00	0,78	0,33
2 Kab. Ponorogo	0,10	1,15	53,27	67,95	0,00	0,00	45,42	30,74	0,00	0,00	1,21	0,15
3 Kab. Trenggalek	0,08	0,29	49,50	58,67	0,00	0,41	49,85	39,43	0,00	0,36	0,57	0,84
4 Kab. Tulungagung	0,57	0,74	81,83	84,24	0,24	0,00	16,83	14,33	0,00	0,00	0,53	0,39
5 Kab. Blitar	0,31	0,65	66,99	72,69	0,00	0,00	32,12	26,08	0,00	0,00	0,59	0,57
6 Kab. Kediri	0,09	0,21	86,39	90,09	0,00	0,15	12,91	8,67	0,00	0,00	0,62	0,89
7 Kab. Malang	0,50	3,36	82,23	84,36	0,00	0,00	15,78	11,54	0,21	0,07	1,27	0,58
8 Kab. Lumajang	1,79	1,44	67,89	73,80	0,08	0,00	29,54	24,47	0,00	0,00	0,70	0,30
9 Kab. Jember	0,00	1,67	76,03	79,44	0,09	0,00	23,12	18,08	0,00	0,00	0,76	0,81
10 Kab. Banyuwangi	0,29	0,19	83,26	85,81	0,22	0,00	15,79	12,97	0,00	0,00	0,43	1,02
11 Kab. Bondowoso	0,07	0,57	58,14	55,56	0,08	0,00	40,81	43,20	0,00	0,00	0,90	0,67
12 Kab. Situbondo	0,00	0,00	71,34	77,97	0,20	0,00	27,56	20,91	0,00	0,00	0,90	1,12
13 Kab. Probolinggo	1,55	0,43	63,27	66,79	0,00	0,00	34,15	32,42	0,00	0,00	1,03	0,29
14 Kab. Pasuruan	0,11	0,88	88,21	89,68	0,18	0,00	11,04	8,79	0,00	0,00	0,46	0,66
15 Kab. Sidoarjo	5,47	0,26	91,25	96,13	0,27	0,20	0,48	0,15	0,00	0,11	2,53	3,15
16 Kab. Mojokerto	0,03	0,36	96,07	96,12	0,04	0,11	1,87	1,48	0,00	0,00	1,99	1,94
17 Kab. Jombang	0,13	0,65	94,31	95,10	0,00	0,10	4,73	3,48	0,00	0,00	0,83	0,66
18 Kab. Nganjuk	1,58	0,44	80,31	92,12	0,24	0,00	16,90	6,71	0,00	0,00	0,97	0,73
19 Kab. Madiun	0,69	0,67	76,42	80,09	0,43	0,06	21,44	18,07	0,11	0,00	0,91	1,10
20 Kab. Magetan	0,31	1,98	85,11	84,44	0,10	0,00	13,51	12,66	0,00	0,00	0,96	0,92
21 Kab. Ngawi	0,35	0,00	75,65	77,07	0,00	0,16	22,55	21,78	0,00	0,00	1,45	0,99
22 Kab. Bojonegoro	0,52	0,26	78,93	80,78	0,54	0,00	19,17	18,53	0,00	0,00	0,84	0,44
23 Kab. Tuban	1,46	0,30	83,76	81,50	0,04	0,00	13,10	16,90	0,00	0,00	1,64	1,30
24 Kab. Lamongan	0,45	0,47	93,68	93,33	0,29	0,08	4,83	4,45	0,08	0,00	0,66	1,68
25 Kab. Gresik	2,93	1,33	93,16	96,18	0,25	0,16	0,61	0,13	0,00	0,00	3,05	2,21
26 Kab. Bangkalan	0,41	0,70	84,14	84,53	0,00	0,31	15,01	13,78	0,00	0,00	0,44	0,67
27 Kab. Sampang	0,35	0,25	78,63	77,09	0,33	0,15	20,24	22,25	0,00	0,00	0,46	0,26
28 Kab. Pamekasan	0,00	0,00	74,13	83,78	0,22	0,19	24,65	15,64	0,00	0,00	1,00	0,38
29 Kab. Sumenep	0,00	0,88	78,76	77,00	0,30	0,00	20,60	21,59	0,00	0,00	0,34	0,53
71 Kota Kediri	0,37	0,66	94,29	95,61	1,18	0,25	1,55	1,35	0,00	0,00	2,60	2,13
72 Kota Blitar	0,84	0,14	92,61	94,77	0,14	0,00	3,18	2,80	0,00	0,00	3,24	2,29
73 Kota Malang	3,10	3,91	87,20	88,90	0,12	0,40	0,16	0,36	0,00	0,00	9,43	6,44
74 Kota Probolinggo	0,00	0,43	96,20	94,99	0,12	0,36	3,00	2,73	0,00	0,00	0,68	1,49
75 Kota Pasuruan	0,00	0,83	97,92	96,00	0,45	0,17	0,54	1,17	0,11	0,00	0,98	1,82
76 Kota Mojokerto	0,26	0,40	95,28	96,88	0,91	0,13	0,30	0,60	0,00	0,00	3,26	2,00
77 Kota Madiun	0,55	1,14	93,28	93,78	0,82	0,56	1,70	1,09	0,00	0,00	3,64	3,43
78 Kota Surabaya	2,27	1,31	89,26	90,27	0,75	1,21	0,06	0,11	0,00	0,07	7,66	7,04
79 Kota Batu	3,61	0,80	94,03	97,50	0,22	0,00	0,94	0,91	0,00	0,00	1,20	0,58
Jawa Timur	0,99	0,95	80,46	83,33	0,20	0,16	16,58	13,97	0,02	0,02	1,75	1,56

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2019-2020.



Tabel 14. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Sumber Penerangan Utama Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019 – 2020

	Kabupaten/Kota	Sumber Penerangan					
		Listrik PLN		Listrik Non PLN		Lainnya	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Kab. Pacitan	99,89	99,84	0,00	0,00	0,11	0,16
2	Kab. Ponorogo	99,95	100,00	0,00	0,00	0,05	0,00
3	Kab. Trenggalek	100,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,05
4	Kab. Tulungagung	99,70	100,00	0,30	0,00	0,00	0,00
5	Kab. Blitar	99,92	99,89	0,00	0,00	0,08	0,11
6	Kab. Kediri	100,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,08
7	Kab. Malang	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kab. Lumajang	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kab. Jember	99,96	99,18	0,00	0,82	0,04	0,00
10	Kab. Banyuwangi	99,40	99,91	0,14	0,00	0,46	0,09
11	Kab. Bondowoso	100,00	98,37	0,00	1,63	0,00	0,00
12	Kab. Situbondo	98,26	99,94	1,74	0,06	0,00	0,00
13	Kab. Probolinggo	97,17	99,20	1,58	0,80	1,26	0,00
14	Kab. Pasuruan	99,95	99,79	0,05	0,21	0,00	0,00
15	Kab. Sidoarjo	100,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,26
16	Kab. Mojokerto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kab. Jombang	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kab. Nganjuk	99,57	99,90	0,30	0,10	0,14	0,00
19	Kab. Madiun	99,85	100,00	0,10	0,00	0,05	0,00
20	Kab. Magetan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kab. Ngawi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kab. Bojonegoro	99,88	100,00	0,00	0,00	0,12	0,00
23	Kab. Tuban	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kab. Lamongan	99,70	99,79	0,20	0,00	0,10	0,21
25	Kab. Gresik	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kab. Bangkalan	99,91	100,00	0,00	0,00	0,09	0,00
27	Kab. Sampang	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kab. Pamekasan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kab. Sumenep	86,61	88,31	12,25	11,34	1,14	0,36
71	Kota Kediri	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Kota Blitar	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Kota Malang	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Kota Probolinggo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Kota Pasuruan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Kota Mojokerto	99,82	100,00	0,00	0,00	0,18	0,00
77	Kota Madiun	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Kota Surabaya	99,91	99,54	0,09	0,39	0,00	0,07
79	Kota Batu	99,85	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00
	Jawa Timur	99,59	99,47	0,47	0,48	0,11	0,05

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2019-2020



Tabel 15. Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat BAB Rumah/ Bangunan Tempat Tinggal Terluas per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020

Kabupaten/Kota		A d a									
		Digunakan hanya ART sendiri		Digunakan bersama ART ruta lain tertentu		Di MCK Umum		ART tidak menggunakan		Tidak ada fasilitas BAB	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kab. Pacitan	92,14	92.50	5,83	5.65	0,44	0,82	0,00	0,11	1,59	0,92
2	Kab. Ponorogo	80,18	88.15	11,68	9.79	2,04	0,00	0,00	0,00	6,09	2,06
3	Kab. Trenggalek	78,28	85.44	12,25	8.80	0,66	0,25	0,00	0,03	8,80	5,47
4	Kab. Tulungagung	89,45	89.47	5,39	8.88	0,64	1,20	0,07	0,00	4,45	0,45
5	Kab. Blitar	88,18	88.23	4,93	10.19	0,27	0,13	0,37	0,00	6,25	1,45
6	Kab. Kediri	83,75	87.56	8,60	6.88	0,30	0,00	0,20	0,00	7,14	5,56
7	Kab. Malang	78,35	83.34	16,97	13.83	0,24	0,00	0,00	0,07	4,45	2,76
8	Kab. Lumajang	82,59	86.39	4,87	4.91	1,61	0,15	0,00	0,00	10,94	8,55
9	Kab. Jember	62,42	66.91	8,80	9.95	0,66	0,83	0,23	0,19	27,89	22,12
10	Kab. Banyuwangi	79,97	78.63	3,97	5.94	0,87	1,70	0,06	0,47	15,13	13,27
11	Kab. Bondowoso	40,29	40.88	17,79	16.08	4,05	4,29	0,30	0,00	37,57	38,75
12	Kab. Situbondo	52,03	52.74	10,07	11.78	1,84	2,21	0,28	0,52	35,79	32,75
13	Kab. Probolinggo	57,94	61.52	13,29	9.97	1,30	1,27	0,48	0,36	27,00	26,88
14	Kab. Pasuruan	75,62	82.19	9,29	7.82	0,99	0,37	0,44	0,11	13,67	9,51
15	Kab. Sidoarjo	86,46	92.34	10,94	6.04	0,47	0,69	0,15	0,00	1,99	0,93
16	Kab. Mojokerto	88,35	85.37	5,92	8.64	0,91	1,23	0,15	0,00	4,68	4,77
17	Kab. Jombang	83,22	83.97	7,52	7.89	0,75	0,69	0,00	0,00	8,51	7,45
18	Kab. Nganjuk	80,85	85.08	8,56	9.41	1,38	0,37	0,13	0,00	9,08	5,14
19	Kab. Madiun	85,52	87.16	9,21	9.58	0,20	0,21	0,00	0,00	5,07	3,05
20	Kab. Magetan	90,83	92.95	4,57	4.21	1,08	0,20	0,25	0,00	3,27	2,64
21	Kab. Ngawi	80,25	83.92	9,92	11.63	0,29	0,20	0,06	0,00	9,48	4,25
22	Kab. Bojonegoro	86,99	88.71	5,71	7.45	0,47	0,16	0,12	0,00	6,71	3,68
23	Kab. Tuban	80,63	80.18	4,55	6.42	1,51	0,87	0,00	0,00	13,31	12,52
24	Kab. Lamongan	93,96	92.71	2,24	1.89	0,11	0,00	0,04	0,00	3,66	5,40
25	Kab. Gresik	89,75	91.28	9,24	6.81	0,13	1,28	0,00	0,00	0,88	0,63
26	Kab. Bangkalan	89,09	83.39	3,72	11.77	0,15	1,82	0,00	0,09	7,04	2,92
27	Kab. Sampang	77,93	72.81	13,36	16.24	0,19	0,13	0,08	0,00	8,44	10,83
28	Kab. Pamekasan	73,30	73.57	21,33	20.69	0,37	0,25	0,08	0,08	4,93	5,40
29	Kab. Sumenep	61,05	64.09	21,40	18.00	3,71	0,79	0,08	0,51	13,75	16,61
71	Kota Kediri	87,46	88.95	9,78	7.51	2,11	3,54	0,25	0,00	0,40	0,00
72	Kota Blitar	89,26	92.46	7,10	6.10	0,33	0,81	0,00	0,00	3,31	0,62
73	Kota Malang	78,65	80.27	19,87	17.65	1,29	2,08	0,00	0,00	0,18	0,00
74	Kota Probolinggo	86,52	87.26	5,58	5.31	3,95	3,75	0,00	0,14	3,95	3,54
75	Kota Pasuruan	86,78	86.11	3,95	5.85	6,06	4,71	0,00	0,00	3,21	3,33
76	Kota Mojokerto	92,65	93.03	4,23	4.84	2,63	1,54	0,00	0,17	0,48	0,41
77	Kota Madiun	85,75	88.37	13,25	10.70	0,85	0,71	0,00	0,21	0,15	0,00
78	Kota Surabaya	73,81	71.72	23,72	24.52	2,17	3,69	0,00	0,00	0,31	0,06
79	Kota Batu	95,21	96.07	3,06	1.89	0,31	0,21	0,00	0,30	1,41	1,52
Jawa Timur		78,59	80,48	10,68	10,58	1,03	1,03	0,12	0,09	9,58	7,82

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2019-2020.



Tabel 16. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan oleh Rumah Tangga dengan Akses Tempat Buang Air Besar untuk ART Sendiri atau Bersama per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020

Kabupaten/Kota	Jenis kloset					
	Leher angsa		Plengsengan		Cemplung/Cubluk	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	66,72	72,31	2,79	4,66	30,49	23,03
2 Kab. Ponorogo	88,71	91,16	0,35	0,79	10,94	8,06
3 Kab. Trenggalek	83,52	83,99	0,24	0,82	16,23	15,20
4 Kab. Tulungagung	87,87	92,65	5,45	3,74	6,67	3,62
5 Kab. Blitar	87,36	87,18	3,52	1,76	9,11	11,06
6 Kab. Kediri	93,22	94,48	1,57	1,56	5,22	3,95
7 Kab. Malang	91,95	94,37	2,18	2,84	5,87	2,80
8 Kab. Lumajang	87,82	93,65	3,63	1,05	8,54	5,30
9 Kab. Jember	95,85	91,56	0,42	4,64	3,72	3,80
10 Kab. Banyuwangi	97,06	98,64	0,70	-	2,25	1,36
11 Kab. Bondowoso	89,80	86,55	1,15	1,50	9,05	11,95
12 Kab. Situbondo	90,99	90,05	0,21	-	8,80	9,95
13 Kab. Probolinggo	84,03	88,12	2,63	4,44	13,34	7,44
14 Kab. Pasuruan	94,19	95,77	1,85	2,07	3,96	2,16
15 Kab. Sidoarjo	99,37	99,08	0,63	0,85	0,00	0,07
16 Kab. Mojokerto	99,13	97,87	0,16	-	0,71	2,13
17 Kab. Jombang	98,76	98,48	0,00	0,15	1,24	1,37
18 Kab. Nganjuk	91,33	93,02	2,15	0,79	6,51	6,19
19 Kab. Madiun	96,13	95,97	0,46	1,23	3,41	2,79
20 Kab. Magetan	95,21	97,10	0,35	0,11	4,44	2,79
21 Kab. Ngawi	87,91	91,94	2,10	0,47	9,99	7,59
22 Kab. Bojonegoro	93,47	92,92	1,31	1,76	5,22	5,31
23 Kab. Tuban	95,36	93,60	0,75	1,47	3,89	4,93
24 Kab. Lamongan	95,69	98,70	2,95	0,90	1,36	0,40
25 Kab. Gresik	99,30	99,49	0,21	-	0,49	0,51
26 Kab. Bangkalan	61,15	61,03	7,73	6,89	31,12	32,08
27 Kab. Sampang	83,40	92,81	0,22	0,78	16,38	6,41
28 Kab. Pamekasan	90,12	91,40	0,87	4,92	9,01	3,68
29 Kab. Sumenep	87,36	84,66	2,94	1,88	9,70	13,46
71 Kota Kediri	99,39	99,52	0,13	0,32	0,48	0,15
72 Kota Blitar	99,62	99,03	0,38	0,58	0,00	0,39
73 Kota Malang	99,12	99,22	0,59	0,41	0,30	0,38
74 Kota Probolinggo	99,22	99,19	0,78	0,29	0,00	0,52
75 Kota Pasuruan	99,89	99,83	0,11	-	0,00	0,17
76 Kota Mojokerto	100,00	100,00	0,00	-	0,00	0,00
77 Kota Madiun	99,82	100,00	0,18	-	0,00	0,00
78 Kota Surabaya	99,06	96,48	0,83	1,27	0,12	2,25
79 Kota Batu	100,00	100,00	0,00	-	0,00	0,00
Jawa Timur	92,64	93,30	1,52	1,69	5,84	5,01

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2019-2020.



Tabel 17. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja oleh Rumah Tangga dengan Akses Tempat Buang Air Besar untuk ART Sendiri atau Bersama per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020

Kabupaten/Kota	Tempat pembuangan akhir tinja									
	Tangki/IPAL		Kolam/Sawah/Sungai/ Laut		Lubang tanah		Pantai/tanah lapang/kebun		Lainnya	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kab. Pacitan	52,10	71.19	0,11	0,09	46,72	28,30	1,07	0,42	0,00	0,00
2 Kab. Ponorogo	84,99	86.02	0,79	2,05	14,23	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kab. Trenggalek	78,30	81.65	2,71	3,38	17,81	14,60	1,18	0,36	0,00	0,00
4 Kab. Tulungagung	87,62	92.69	3,83	2,30	8,39	5,01	0,16	0,00	0,00	0,00
5 Kab. Blitar	74,55	78.60	6,23	6,12	19,22	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kab. Kediri	85,63	87.86	1,47	2,11	12,90	9,87	0,00	0,15	0,00	0,00
7 Kab. Malang	61,66	70.17	1,85	1,77	36,37	27,82	0,11	0,24	0,00	0,00
8 Kab. Lumajang	62,90	79.65	2,88	0,53	34,07	19,82	0,15	0,00	0,00	0,00
9 Kab. Jember	75,25	88.55	6,63	6,87	17,81	4,42	0,31	0,16	0,00	0,00
10 Kab. Banyuwangi	90,90	89.97	3,47	6,24	5,59	3,80	0,05	0,00	0,00	0,00
11 Kab. Bondowoso	61,09	65.75	10,95	6,61	27,51	27,64	0,45	0,00	0,00	0,00
12 Kab. Situbondo	72,37	81.56	2,79	3,22	24,03	15,22	0,82	0,00	0,00	0,00
13 Kab. Probolinggo	64,18	72.67	3,99	3,81	31,47	23,34	0,37	0,18	0,00	0,00
14 Kab. Pasuruan	73,23	83.31	6,12	5,34	20,65	11,08	0,00	0,21	0,00	0,06
15 Kab. Sidoarjo	96,08	97.94	2,79	1,91	1,13	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Kab. Mojokerto	90,78	96.67	2,28	1,16	6,94	1,93	0,00	0,24	0,00	0,00
17 Kab. Jombang	96,40	97.02	1,01	1,69	2,59	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Kab. Nganjuk	83,80	91.03	2,24	2,21	13,87	6,38	0,09	0,38	0,00	0,00
19 Kab. Madiun	91,11	92.47	2,03	1,04	6,29	6,49	0,56	0,00	0,00	0,00
20 Kab. Magetan	87,21	88.94	3,20	2,35	8,67	8,71	0,92	0,00	0,00	0,00
21 Kab. Ngawi	81,80	85.86	4,65	6,18	13,31	7,85	0,25	0,11	0,00	0,00
22 Kab. Bojonegoro	91,61	93.63	0,30	0,11	6,80	6,08	1,29	0,11	0,00	0,08
23 Kab. Tuban	87,01	92.56	1,50	1,84	9,95	5,00	1,53	0,60	0,00	0,00
24 Kab. Lamongan	91,16	94.57	2,61	1,43	6,23	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Kab. Gresik	88,96	98.78	0,31	0,67	10,72	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Kab. Bangkalan	50,45	46.44	0,16	1,15	49,09	51,43	0,29	0,88	0,00	0,09
27 Kab. Sampang	76,48	91.30	0,64	0,75	21,86	7,63	1,02	0,15	0,00	0,18
28 Kab. Pamekasan	26,95	18.15	2,88	1,50	70,02	80,25	0,15	0,10	0,00	0,00
29 Kab. Sumenep	54,70	46.85	1,50	1,43	43,75	49,18	0,06	2,54	0,00	0,00
71 Kota Kediri	98,44	99.23	0,76	0,62	0,80	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Kota Blitar	98,79	98.66	1,21	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Kota Malang	86,71	85.29	10,51	14,52	2,78	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Kota Probolinggo	96,37	95.56	3,63	3,57	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Kota Pasuruan	95,84	97.89	4,16	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Kota Mojokerto	97,95	96.53	0,77	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00
77 Kota Madiun	99,04	99.63	0,78	0,37	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Kota Surabaya	96,71	96.63	3,17	2,53	0,12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,35
79 Kota Batu	94,45	95.14	5,55	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jawa Timur	80,46	84,75	3,05	3,02	16,23	12,00	0,25	0,19	0,00	0,04

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2019-2020.



3.4 Kesehatan Lingkungan

Upaya penyediaan sanitasi dan air minum layak semakin ditingkatkan setiap tahunnya. Hal ini karena sanitasi dan air minum yang layak merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia. Di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs khususnya sektor lingkungan hidup, salah satu poinnya adalah air bersih dan sanitasi layak dengan memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Tahun 2024, Pemerintah Indonesia menargetkan seluruh masyarakat telah memiliki akses air minum layak dan 90 persen masyarakat mendapatkan akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 20 persen akses sanitasi layak. Demi tercapainya tujuan tersebut pemerintah pusat maupun daerah membuat berbagai macam program dengan target adalah wilayah dimana masyarakatnya belum memiliki akses sanitasi dan air minum layak. Dengan adanya program dari pemerintah juga perlu dibuat monitoring terhadap capaian program tersebut. Keberhasilan atas capaian program sebetulnya tidak hanya berasal dari tangan pemerintah saja tetapi juga dibutuhkan kerja sama di dalam masyarakat. Kebiasaan buruk yang masih dilakukan oleh masyarakat sangat menghambat keberhasilan program akses sanitasi dan air minum layak.

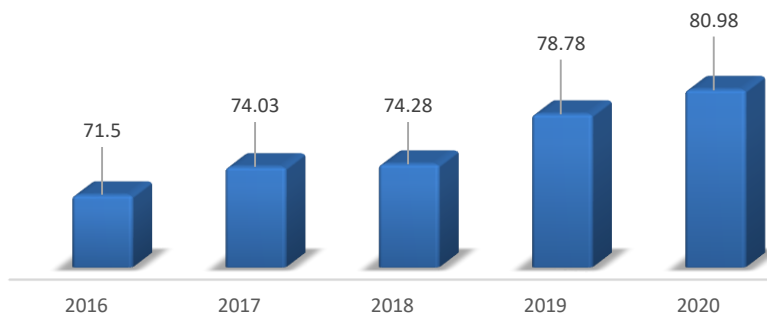
3.4.1. Sanitasi Layak

Kriteria sanitasi yang layak adalah apabila fasilitas tempat buang air besar yang digunakan pada rumah tangga sendiri atau bersama rumah tangga lain bukan di MCK umum, jenis kloset yang digunakan adalah leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki/SPAL. Di dalam penghitungan rumah layak huni salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya akses terhadap sanitasi layak. Semakin baik akses terhadap sanitasi layak berarti juga akan mempengaruhi dari angka pada rumah layak huni.

Jika melihat capaian persentase sanitasi layak di Jawa Timur pada tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka sebesar 80,98 persen. Capaian ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mencerminkan gambaran kondisi akses sanitasi layak masyarakat di Jawa Timur semakin membaik dari tahun ke tahun. Kesadaran masyarakat untuk membuang kotoran melalui tanki septik/lpal atau tersedianya fasilitas BAB atau penggunaan kloset leher angsa juga semakin tinggi. Capaian ini juga sebagai hasil bahwa program yang dilaksanakan oleh pemerintah telah berjalan dengan semestinya.



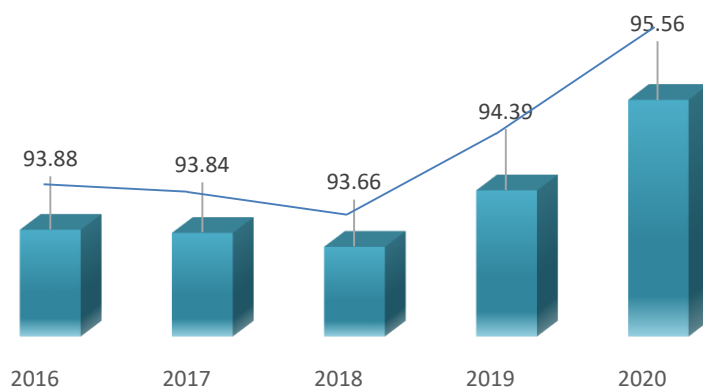
Gambar 11. Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Akses Terhadap Air Minum Layak, 2016 – 2020



3.4.2. Air Minum Layak

Sumber air minum rumah tangga dapat dirinci menjadi sumber air minum layak dan tidak layak. Rumah tangga dikatakan memiliki sumber air minum layak apabila pada rumah tangga tersebut memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan.

Gambar 12. Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Akses Terhadap Air Minum Layak, 2016 – 2020



Catatan : * Data Backcasting menggunakan konsep air minum layak terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019



3.4.3. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Berdasarkan Permenpupr RI No. 29/PRT/M/2018 tentang Rumah Layak Huni harus memenuhi beberapa kriteria meliputi kecukupan luas minimum sebesar $7,2 \text{ m}^2 - 12 \text{ m}^2$ per penduduk, memiliki keselamatan bangunan, dan dari aspek kesehatan harus memiliki pencahayaan, sirkulasi udara yang baik, adanya sanitasi layak juga tersedianya air bersih. Di dalam UU No. 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah turut menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Kondisi rumah layak huni di Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 68,08 persen yang artinya ada sekitar 65,61 persen rumah tangga yang memiliki rumah layak huni. Sedangkan rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap rumah layak huni sebesar 31,92 persen. Keadaan ini merata hampir di seluruh Jawa Timur, beberapa kabupaten dan kota sudah memiliki akses terhadap rumah layak huni diatas rata-rata angka RLH Jawa Timur tetapi ada beberapa kabupaten yang lain masih di bawah angka Jawa Timur. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel lampiran



Tabel 18. Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2020

Kabupaten/Kota	Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak				
	2016*	2017*	2018*	2019*	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Kab. Pacitan	65,01	62,36	67,11	65,01	69,90
2 Kab. Ponorogo	77,41	79,69	83,27	80,37	84,97
3 Kab. Trenggalek	64,14	69,09	71,43	72,72	76,81
4 Kab. Tulungagung	78,16	82,95	78,72	79,82	89,45
5 Kab. Blitar	72,73	69,87	70,35	75,73	80,36
6 Kab. Kediri	79,33	78,75	78,59	84,73	83,59
7 Kab. Malang	70,21	75,12	73,69	79,49	80,99
8 Kab. Lumajang	63,55	64,21	73,25	69,59	84,53
9 Kab. Jember	56,14	60,88	56,15	63,78	65,83
10 Kab. Banyuwangi	69,46	71,57	69,61	78,36	77,44
11 Kab. Bondowoso	34,45	30,90	35,67	43,10	44,07
12 Kab. Situbondo	45,01	44,13	48,15	52,14	55,29
13 Kab. Probolinggo	39,29	50,75	46,14	55,96	59,76
14 Kab. Pasuruan	60,08	60,62	68,11	73,47	80,03
15 Kab. Sidoarjo	92,34	93,94	90,64	94,07	95,52
16 Kab. Mojokerto	84,72	81,10	84,96	91,30	91,02
17 Kab. Jombang	81,53	84,30	84,72	88,70	88,98
18 Kab. Nganjuk	73,08	79,51	82,16	79,58	85,75
19 Kab. Madiun	85,91	86,91	84,11	89,14	91,92
20 Kab. Magetan	85,09	86,58	82,71	84,00	88,65
21 Kab. Ngawi	60,59	74,52	67,85	76,34	83,67
22 Kab. Bojonegoro	71,41	78,11	80,58	86,58	89,02
23 Kab. Tuban	68,71	68,99	75,49	77,79	79,03
24 Kab. Lamongan	83,19	85,00	93,66	90,08	92,23
25 Kab. Gresik	95,93	93,97	94,41	97,99	96,90
26 Kab. Bangkalan	41,53	43,24	51,66	54,66	56,18
27 Kab. Sampang	59,75	63,51	69,83	73,04	81,85
28 Kab. Pamekasan	65,44	66,49	61,84	72,37	68,25
29 Kab. Sumenep	55,53	54,29	55,38	68,63	64,74
71 Kota Kediri	93,78	89,54	93,96	95,60	95,40
72 Kota Blitar	94,09	94,28	94,40	94,82	96,67
73 Kota Malang	80,89	83,20	84,86	85,20	83,25
74 Kota Probolinggo	78,16	83,88	83,56	88,32	88,45
75 Kota Pasuruan	74,97	76,58	83,04	86,86	90,02
76 Kota Mojokerto	90,42	93,35	93,36	94,89	94,48
77 Kota Madiun	97,36	90,81	94,51	98,06	98,71
78 Kota Surabaya	92,04	94,69	87,18	93,89	91,84
79 Kota Batu	91,37	91,13	90,85	92,82	93,20
Jawa Timur	71,50	74,03	74,28	78,78	80,98

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2015-2019. Backcasting

Catatan : * Data Backcasting menggunakan konsep air minum layak terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019



Tabel 19. Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-2020

Kabupaten/Kota	Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak				
	2016*	2017*	2018*	2019*	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Kab. Pacitan	72,88	76,55	81,57	77,72	84,43
2 Kab. Ponorogo	96,58	94,15	92,57	93,02	91,15
3 Kab. Trenggalek	71,96	68,59	73,19	80,53	80,64
4 Kab. Tulungagung	97,22	98,40	98,89	97,65	96,75
5 Kab. Blitar	96,82	91,11	91,73	92,71	95,35
6 Kab. Kediri	94,60	95,75	95,70	97,42	98,89
7 Kab. Malang	90,90	96,23	94,56	98,00	95,48
8 Kab. Lumajang	96,29	97,63	95,18	93,98	95,89
9 Kab. Jember	94,29	91,58	91,85	92,98	90,49
10 Kab. Banyuwangi	91,78	93,46	95,04	94,03	91,62
11 Kab. Bondowoso	93,37	92,82	93,76	93,12	91,75
12 Kab. Situbondo	94,24	94,23	95,37	96,28	96,18
13 Kab. Probolinggo	87,80	94,94	90,92	89,59	92,16
14 Kab. Pasuruan	97,39	96,53	95,87	93,14	97,21
15 Kab. Sidoarjo	99,29	96,57	94,86	97,55	99,06
16 Kab. Mojokerto	98,05	97,40	97,02	98,87	99,20
17 Kab. Jombang	98,42	98,79	97,35	94,01	99,37
18 Kab. Nganjuk	98,83	98,08	94,37	97,34	99,45
19 Kab. Madiun	99,05	95,80	95,43	96,28	97,83
20 Kab. Magetan	99,83	99,19	98,78	98,96	99,46
21 Kab. Ngawi	94,37	95,61	96,75	95,72	99,49
22 Kab. Bojonegoro	94,49	98,42	92,90	98,18	96,94
23 Kab. Tuban	95,16	96,79	97,16	96,02	97,58
24 Kab. Lamongan	83,86	88,78	83,26	84,31	92,18
25 Kab. Gresik	89,81	93,88	89,27	97,19	94,63
26 Kab. Bangkalan	91,65	85,06	92,83	90,38	93,92
27 Kab. Sampang	81,58	75,62	87,06	82,71	89,89
28 Kab. Pamekasan	87,14	80,83	83,46	84,03	90,49
29 Kab. Sumenep	93,80	94,03	96,58	95,19	97,82
71 Kota Kediri	99,91	97,53	99,08	99,85	99,67
72 Kota Blitar	94,92	94,88	96,69	96,49	98,37
73 Kota Malang	99,26	99,90	98,36	99,26	99,89
74 Kota Probolinggo	99,82	100,00	100,00	99,85	100,00
75 Kota Pasuruan	99,53	99,35	100,00	99,55	99,72
76 Kota Mojokerto	99,46	98,29	96,95	98,08	100,00
77 Kota Madiun	99,74	97,78	98,87	99,87	99,83
78 Kota Surabaya	98,19	95,43	96,36	97,65	98,74
79 Kota Batu	99,49	99,01	99,16	94,99	99,02
Jawa Timur	93,88	93,84	93,66	94,39	95,56

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2015-2019. Backcasting

Catatan : * Data Backcasting menggunakan konsep air minum layak terbaru berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019



Tabel 20. Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Rumah Layak Huni Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2019-2020

	Kabupaten/Kota	Rumah Layak Huni			
		2019		2020	
		Tidak Layak	Layak Huni	Tidak Layak	Layak Huni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Kab. Pacitan	49,06	50,94	43,17	56,83
2	Kab. Ponorogo	28,06	71,94	23,16	76,84
3	Kab. Trenggalek	40,68	59,32	37,61	62,39
4	Kab. Tulungagung	25,78	74,22	19,99	80,01
5	Kab. Blitar	32,29	67,71	26,45	73,55
6	Kab. Kediri	22,21	77,79	23,26	76,74
7	Kab. Malang	26,87	73,13	28,33	71,67
8	Kab. Lumajang	37,50	62,50	22,45	77,55
9	Kab. Jember	41,29	58,71	39,63	60,37
10	Kab. Banyuwangi	29,42	70,58	31,80	68,20
11	Kab. Bondowoso	61,29	38,71	63,51	36,49
12	Kab. Situbondo	56,16	43,84	52,65	47,35
13	Kab. Probolinggo	52,76	47,24	49,71	50,29
14	Kab. Pasuruan	38,28	61,72	30,41	69,59
15	Kab. Sidoarjo	20,75	79,25	18,66	81,34
16	Kab. Mojokerto	15,63	84,37	17,19	82,81
17	Kab. Jombang	24,98	75,02	20,46	79,54
18	Kab. Nganjuk	33,28	66,72	24,91	75,09
19	Kab. Madiun	21,68	78,32	19,67	80,33
20	Kab. Magetan	20,09	79,91	15,83	84,17
21	Kab. Ngawi	44,48	55,52	35,95	64,05
22	Kab. Bojonegoro	42,72	57,28	39,35	60,65
23	Kab. Tuban	36,65	63,35	34,62	65,38
24	Kab. Lamongan	32,71	67,29	25,09	74,91
25	Kab. Gresik	22,82	77,18	19,75	80,25
26	Kab. Bangkalan	54,23	45,77	50,03	49,97
27	Kab. Sampang	51,51	48,49	38,81	61,19
28	Kab. Pamekasan	51,08	48,92	49,96	50,04
29	Kab. Sumenep	38,55	61,45	39,04	60,96
71	Kota Kediri	15,44	84,56	16,81	83,19
72	Kota Blitar	15,84	84,16	12,95	87,05
73	Kota Malang	22,25	77,75	23,60	76,40
74	Kota Probolinggo	16,41	83,59	17,10	82,90
75	Kota Pasuruan	19,45	80,55	18,05	81,95
76	Kota Mojokerto	21,09	78,91	18,68	81,32
77	Kota Madiun	9,45	90,55	6,29	93,71
78	Kota Surabaya	42,56	57,44	47,98	52,02
79	Kota Batu	19,24	80,76	20,13	79,87
	Jawa Timur	34,39	65,61	31,92	68,08

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret. 2019-2020.





Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya
Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007

Website : <https://jatim.bps.go.id/>, Email : bps3500@bps.go.id

ISSN 2747-2566



9 772747 256606 >